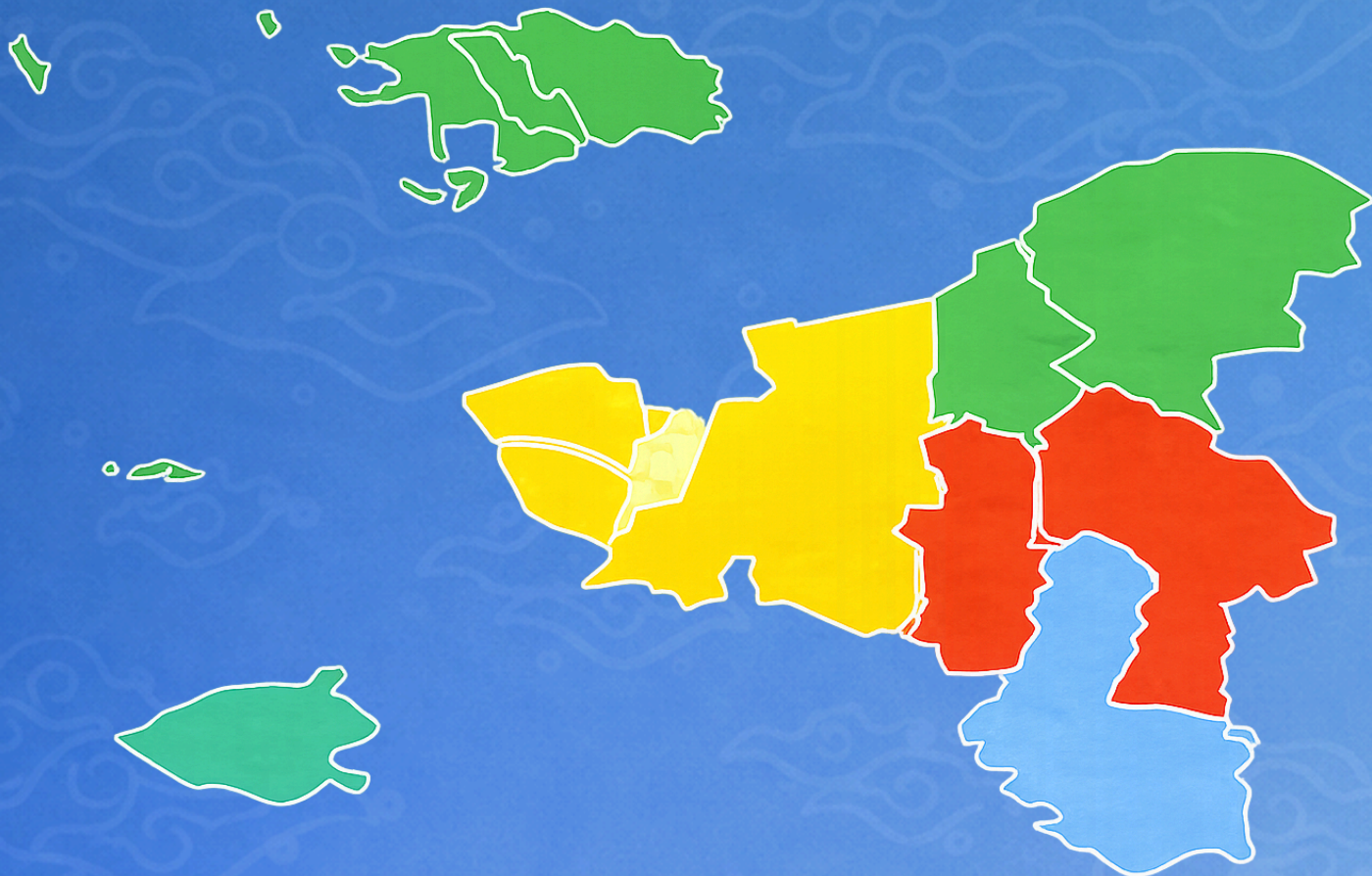


LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN JUNI 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Juni Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Juni 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

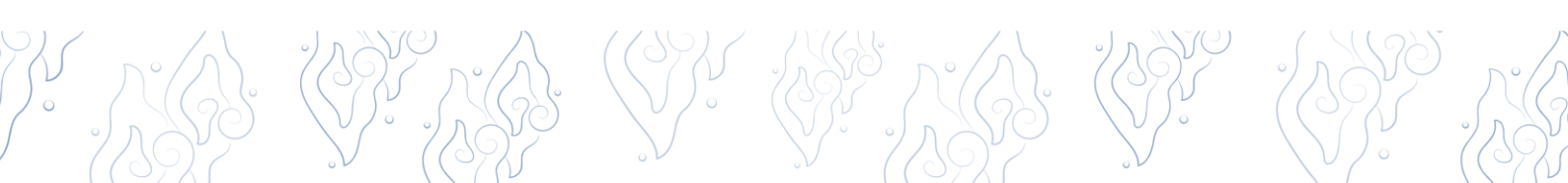
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Dasar Hukum (Landasan).....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA.....	7
2.1 Definisi BPP	7
2.2 Tugas BPP	7
2.3 Fungsi BPP	7
2.4 Struktur BPP	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat	9
3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas	18
3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif.....	29
3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)	40
3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)	44
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN	117
4.1 Capaian.....	117
4.2 Permasalahan.....	120
4.3 Tantangan	121
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Rekomendasi	122
5.3 Penutup.....	123



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
 - 3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
 - 5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
 - 3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Juni 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

2. Tujuan

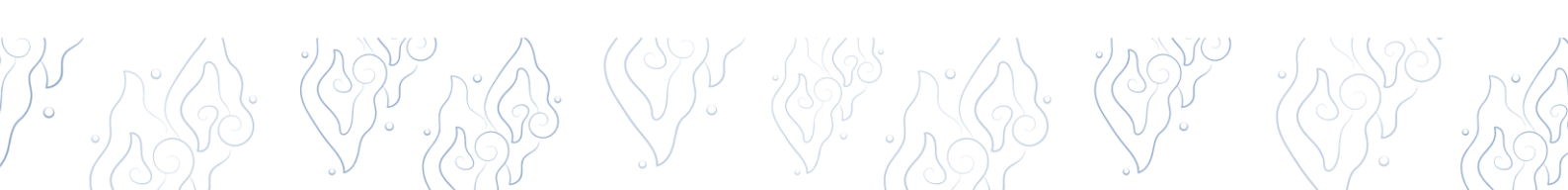
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Juni 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah Papua.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

1.3 Ruang Lingkup

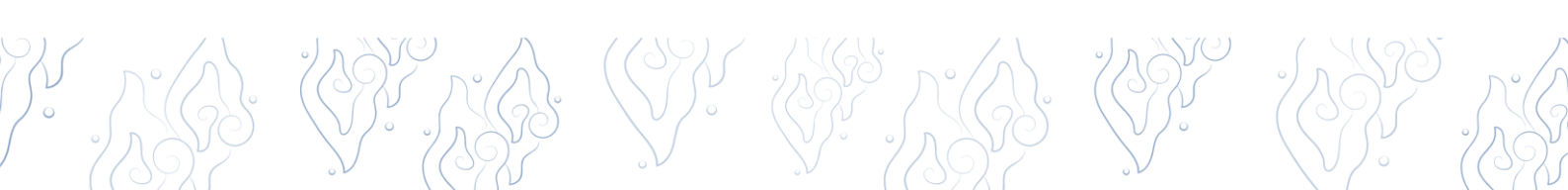
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Juni 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–30 Juni 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA

2.1 Definisi BPP

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

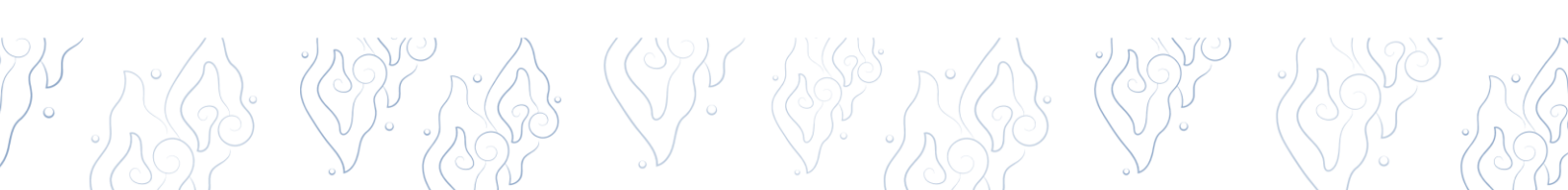
2.2 Tugas BPP

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Fungsi BPP

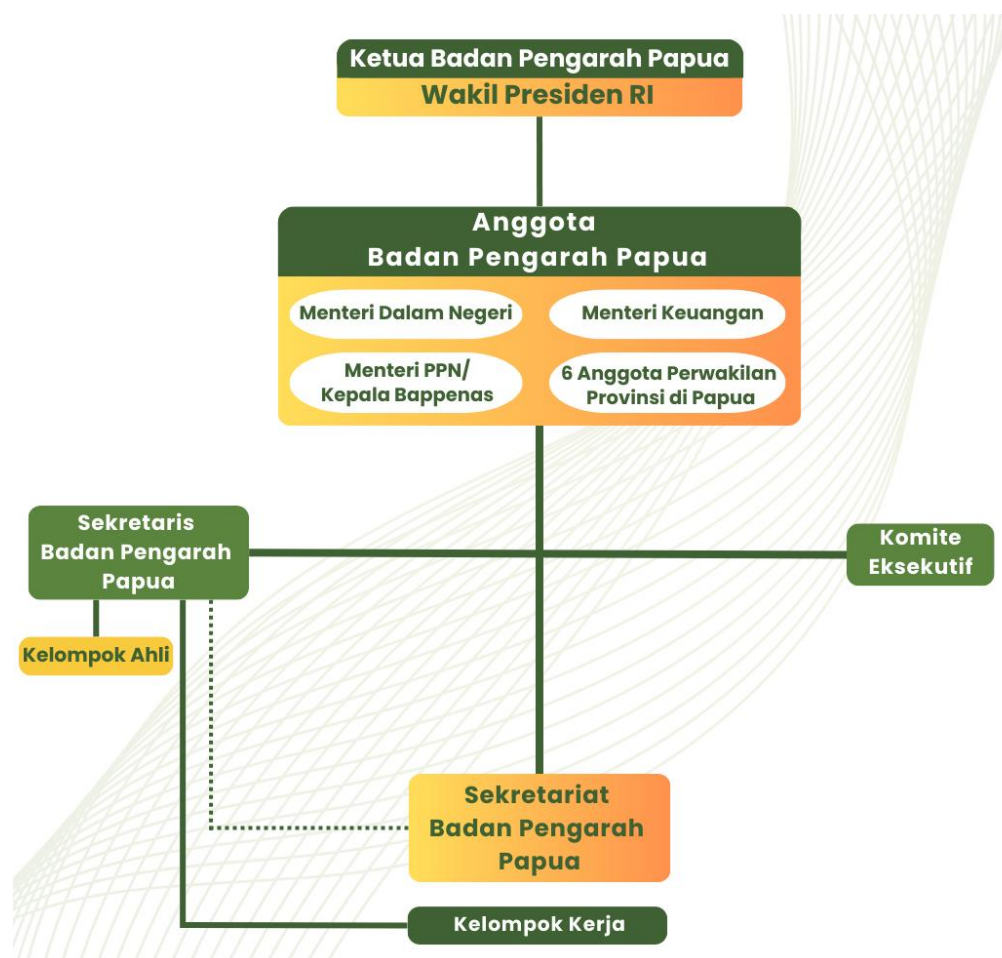
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.4 Struktur BPP



BAB III

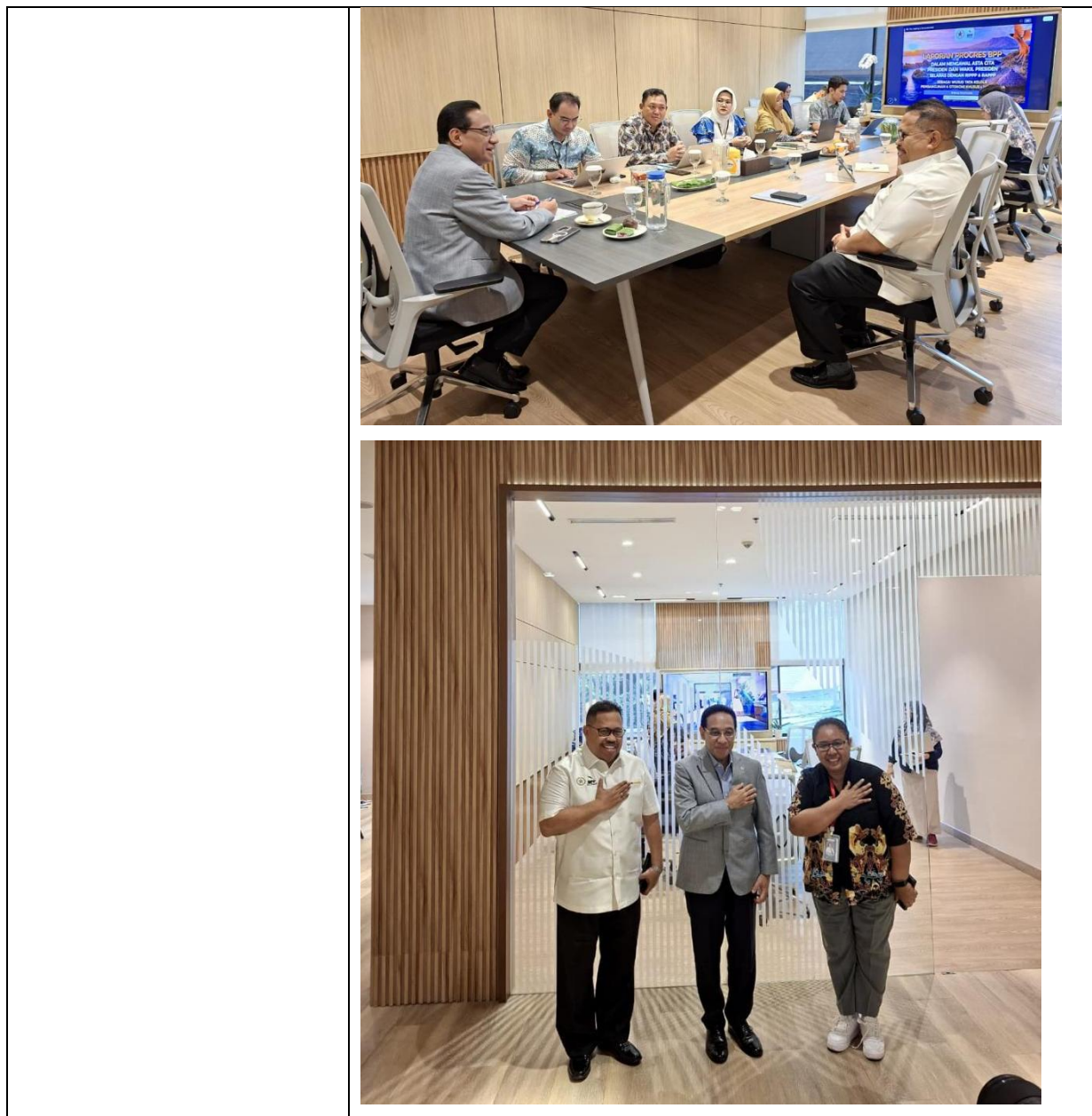
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK Percepatan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Papua Barat Daya bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 10 Juni 2026 di Ruang Rapat Wamenkes RI, Jakarta
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
Latar Belakang	Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya sebagian besar dipengaruhi oleh perencanaan yang bersifat top-down, yaitu berasal dari Kementerian Kesehatan dan wajib diimplementasikan di daerah tanpa memperhatikan data valid yang berasal dari daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan program karena belum terjadinya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah pusat dengan kesiapan daerah, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan SHEK bidang kesehatan.
Peserta Kegiatan	• Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Oktovianus, Sp.P. • Anggota BPP Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihallow, M.A.

	• Anggota Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Barat Daya, drg. Rosaline Krimadi, MPH., Sp.PM. • Direktur Jenderal Layanan Rujukan. • Binwas Wilayah Papua BKPK Kementerian Kesehatan. • Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Perkembangan layanan kesehatan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. • Program preventif terkait tuberkulosis (TB) paru. • Rencana pengadaan alat diagnostik TB. • Lain-lain.
Hasil Kegiatan	Rencana kunjungan Wakil Menteri Kesehatan ke Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Perencanaan bidang kesehatan hendaknya disinkronkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dokumentasi	



Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Workshop "Membangun Kesadaran dan Mobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV"
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 11 Juni 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.

	• Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua. • Indeks Pemenuhan Pembelajaran.
Latar Belakang	Yayasan Sorong Sehati bersama beberapa LSM lainnya yang aktif di bidang pencegahan dan penanganan HIV/AIDS memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Namun, saat ini penyelenggaraan layanan oleh LSM mengalami kendala dari sisi pembiayaan akibat berakhirnya dukungan dari salah satu donor, yaitu Global Fund (GF), yang selama ini secara intensif memberikan pendampingan dan dukungan anggaran bagi program penanganan HIV/AIDS di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan SHEK bidang kesehatan.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihallaw, M.A. • Anggota Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Barat Daya. • Pemerintah Kota Sorong. • DPR Kota Sorong. • LSM pemerhati HIV/AIDS. • Sektor swasta.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Optimalisasi sumber daya untuk mendukung program penanggulangan HIV/AIDS. • Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif pembiayaan.

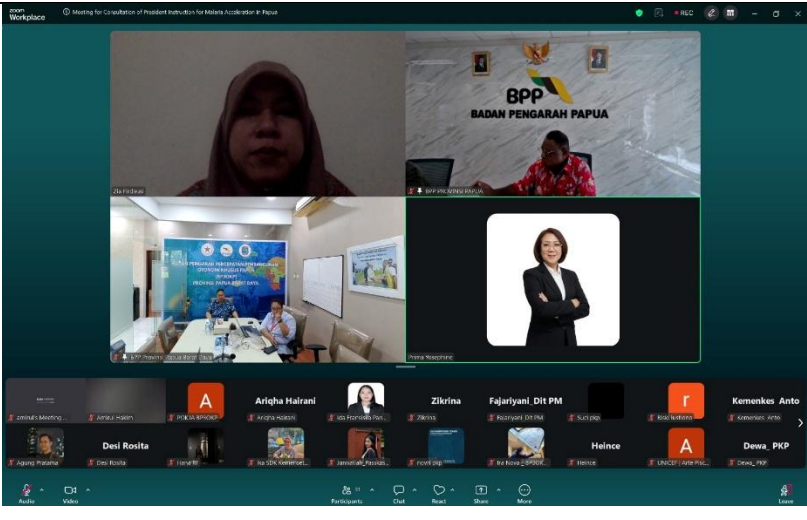
Hasil Kegiatan	• Terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya mobilisasi sumber daya domestik untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS pasca berakhirnya dukungan pendanaan dari Global Fund (GF). • Teridentifikasi potensi pemanfaatan skema Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam mendukung program penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya. • Tersusun rencana tindak lanjut (RTL) beserta jadwal pelaksanaannya (time schedule) sebagai acuan koordinasi dan implementasi program ke depan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan HIV/AIDS sebagai substitusi pembiayaan yang sebelumnya didukung oleh Global Fund (GF).
Dokumentasi	



Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Rapat Penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 12 Juni 2026 di Daring/Zoom Meetings
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Salah satu indikator capaian Misi Papua Sehat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) adalah eliminasi malaria. Hingga saat ini, di Provinsi Papua Barat Daya baru dua kabupaten yang telah dinyatakan mencapai eliminasi malaria, yaitu

	Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua melalui penyusunan kebijakan yang terintegrasi.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan SHEK antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
Peserta Kegiatan	1. Kementerian Kesehatan. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 3. Dinas Kesehatan. 4. Badan Pengarah Papua.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	Pembahasan kebijakan bidang kesehatan terkait percepatan penanganan dan eliminasi malaria di Tanah Papua.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Pengarah Papua dalam rangka penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Tanah Papua. • Teridentifikasinya kondisi capaian eliminasi malaria di Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. • Tersusunnya rencana tindak lanjut sebagai dasar koordinasi dan implementasi percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Menjadikan RIPPP dan RAPPP sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan

	bidang kesehatan, khususnya dalam upaya percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua.
Dokumentasi	

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Pelantikan Pengurus POGI Cabang Papua Barat–Papua Barat Daya Periode 2025–2028
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 18 Juni 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Organisasi profesi, termasuk Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan kompetensi tenaga kesehatan, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan di daerah.

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan SHEK bidang kesehatan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan organisasi profesi dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Pengurus POGI Cabang Papua Barat–Papua Barat Daya. • Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya. • Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. • Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. • Organisasi profesi kesehatan. • Undangan lainnya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Pelantikan Pengurus POGI Cabang Papua Barat–Papua Barat Daya Periode 2025–2028. • Penguatan peran organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. • Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	• Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi antara BPP Provinsi Papua Barat Daya dengan POGI Cabang Papua Barat–Papua Barat Daya dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan. • Menguatnya komitmen organisasi profesi untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Papua Barat Daya. • Teridentifikasinya peluang sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan

	kesehatan dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara BPP Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah daerah, dan organisasi profesi kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, sebagai bagian dari pelaksanaan RIPPP dan RAPPP.
Dokumentasi	-

3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Sosialisasi Program Sekolah Genius
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 18 Juni 2026 di Hotel Vega Sorong
IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
Latar Belakang	Sekolah Genius merupakan salah satu model pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan penalaran siswa sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Mengikuti sosialisasi Program Sekolah Genius sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya. • Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Komisi IV Bidang Pendidikan.

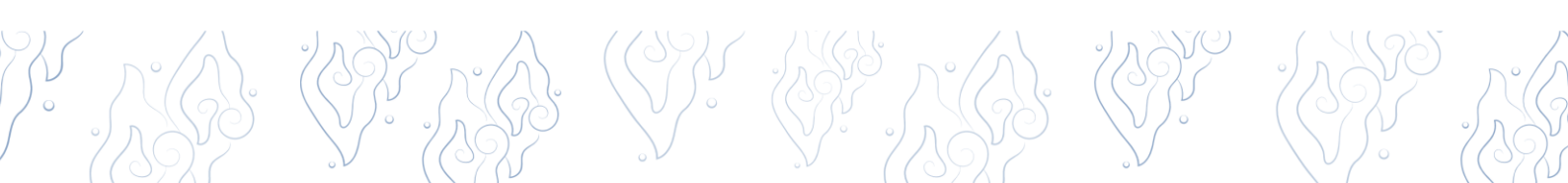
	• BPP Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Pokja Cerdas). • Perwakilan Sekolah Genius.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	Sekolah Generasi Indonesia Jaya untuk Semua (GenIUS) didirikan untuk memberikan layanan pendidikan bagi pelajar asal Indonesia Timur. GenIUS meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal apabila memperoleh stimulasi yang tepat. Melalui berbagai program yang terafiliasi dengan aktivitas riset, GenIUS mendorong peserta didik untuk berpikir kritis serta membangun karakter sebagai peneliti. Keunggulan tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menginisiasi kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
Hasil Kegiatan	Sebagai Badan Pengarah, BPP Provinsi Papua Barat Daya mendukung setiap upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dengan tetap memberikan berbagai pertimbangan strategis sebagai berikut: • Perlunya kejelasan mengenai tujuan dan target yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui pengiriman peserta didik ke Sekolah Genius. • Berdasarkan konsep Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), pembangunan pendidikan di Tanah Papua diarahkan pada model pendidikan yang bersifat inklusif, sehingga perlu dipastikan bahwa pelaksanaan program tetap sejalan dengan prinsip tersebut.

	• Pengiriman peserta didik dalam jumlah terbatas (10–20 orang) dipandang belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan indikator pendidikan, khususnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua Barat Daya. • Permasalahan rendahnya kemampuan penalaran peserta didik masih menjadi tantangan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini tercermin dari hasil Rapor Pendidikan, di mana baru Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang menunjukkan capaian relatif baik, sementara kabupaten lainnya masih berada di bawah 60. Oleh karena itu, apabila program ini dilaksanakan, perlu disiapkan program percepatan pendidikan yang menjangkau peserta didik lain yang tidak memperoleh kesempatan mengikuti Sekolah Genius.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pendidikan Khusus sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 106. Pendidikan khusus dalam konteks ini tidak terbatas pada Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga dapat mencakup kebijakan pengiriman peserta didik ke Sekolah Genius sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Papua Barat Daya. • Menyusun Peraturan Gubernur mengenai mekanisme dan tahapan seleksi peserta didik yang akan mengikuti Program Sekolah Genius. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah memprioritaskan peserta didik dengan kebutuhan atau kondisi khusus, seperti lulusan Program Sarjana

	Siswa Harapan (SSH), peserta didik dari panti asuhan, maupun kelompok sasaran lainnya.
Dokumentasi	 

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Pendampingan dan Fasilitasi Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu, 20 Juni 2026 di UNIPA, Manokwari



IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) merupakan bentuk komitmen antara dua atau lebih lembaga untuk menjalin kerja sama dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA) merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan melalui misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Memberikan arahan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka membangun komitmen bersama dengan Universitas Papua (UNIPA) dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Rektor Universitas Papua beserta para Wakil Rektor. • Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. • Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya didampingi Pokja Papua Cerdas. • Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. • Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Nota Kesepahaman (MoU) merupakan payung hukum yang bersifat umum sebagai dasar pelaksanaan kerja sama. Universitas Papua

	(UNIPA), sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Tanah Papua, berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Komitmen tersebut didukung oleh jajaran pimpinan UNIPA, Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, serta Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas. • Dalam rangka percepatan pembangunan melalui misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai perguruan tinggi di Tanah Papua sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.E., dengan Universitas Papua yang diwakili oleh Rektor, Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum. • Terbangunnya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua dalam mendukung percepatan pembangunan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. • Disepakati tindak lanjut implementasi kerja sama melalui penyusunan program-program yang mendukung percepatan pembangunan, dengan prioritas awal pada pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Akademi Komunitas.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Pokja Papua Cerdas bersama pokja lainnya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut implementasi Nota Kesepahaman (MoU), dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sesuai misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Dokumentasi	



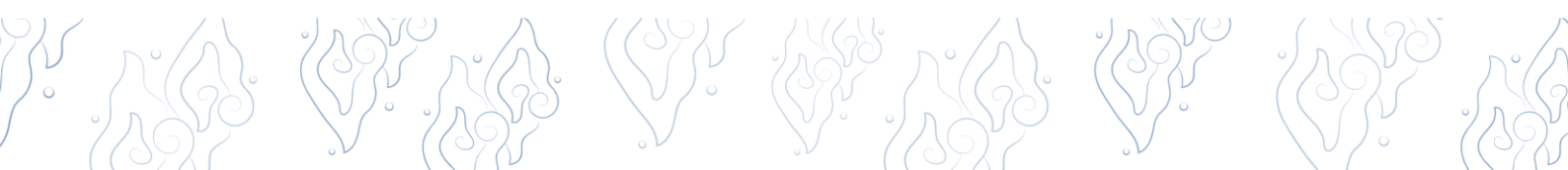
Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Forum SHEK Misi Papua Cerdas: Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi Pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat dalam Mendukung Percepatan Misi Papua Cerdas di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 26 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.

	• Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) yang bertujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta menurunkan angka anak tidak sekolah dan angka putus sekolah. Implementasi Program SSH telah berjalan di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat dengan model pelaksanaan yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan Forum SHEK sebagai wadah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk mengidentifikasi praktik baik (best practice), tantangan, serta menyusun rekomendasi dalam rangka penguatan implementasi Program SSH di Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan Misi Papua Cerdas di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan seluruh Anggota Pokja-PJ Pokja Papua Cerdas). • Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan beserta tim. • Tim Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Kabupaten Sorong Selatan. • Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat. • Tim Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Kabupaten Maybrat.

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat. • Penyampaian praktik baik (best practices), tantangan, dan kebutuhan pengembangan Program SSH pada masing-masing daerah. • Penguatan implementasi SSH sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung pencapaian target RIPPP dan RAPPP, khususnya peningkatan HLS, RLS, APS, dan penurunan angka putus sekolah. • Penyusunan rekomendasi serta model pengembangan Program SSH yang dapat diterapkan di Provinsi Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya Forum SHEK sebagai media sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) antara BPP Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat. • Teridentifikasinya praktik baik (best practice) pelaksanaan Program SSH di Kabupaten Sorong Selatan yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan SSH di kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat Daya. • Terpetakannya berbagai tantangan pelaksanaan SSH di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, meliputi keterbatasan data, aksesibilitas wilayah, sumber daya manusia, dan dukungan

	pembiayaan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. • Terbangunnya kesepahaman bahwa pengembangan Program SSH harus tetap berorientasi pada peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta penurunan angka putus sekolah sesuai target RIPPP dan RAPPP
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mengompilasi hasil Forum SHEK sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka penguatan implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). • Mendorong penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Program SSH sebagai pedoman pelaksanaan yang tetap memberikan ruang penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing daerah. • Mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas dukungan pelaksanaan SSH melalui skema hibah maupun dukungan pendanaan lainnya pada wilayah prioritas. • Mendorong pengembangan Program SSH berbasis data serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan Program SSH di Provinsi Papua Barat Daya.



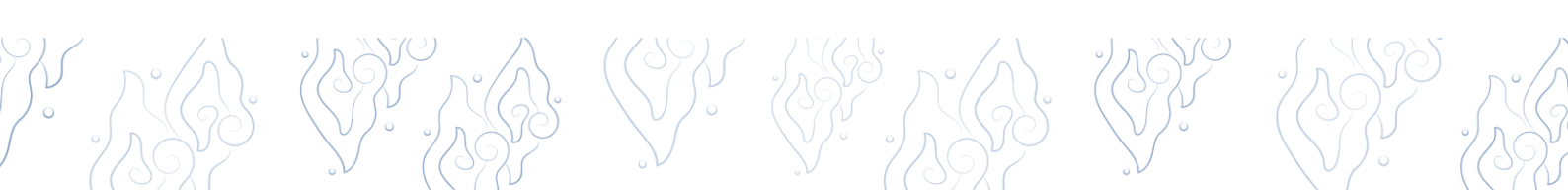
Dokumentasi



3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya terkait Penguatan Sektor Transportasi dan Pelayaran
----------------------	---



Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 25 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Transportasi laut merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung konektivitas wilayah serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Namun demikian, masih terdapat berbagai kebutuhan pengembangan infrastruktur pelayaran dan sarana pendukung yang memerlukan dukungan pemerintah pusat maupun daerah. Melalui Forum SHEK ini, Badan Pengarah Papua bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap kebutuhan pembangunan sektor pelayaran guna mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka penguatan sektor transportasi laut dan pelayaran sebagai pendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Kelompok Kerja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Barat Daya. • Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Bidang Pelayaran.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif

Poin-Poin Pembahasan	• Paparan Dinas Perhubungan mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar pelayaran melalui Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), termasuk pembangunan dermaga perintis di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat. • Kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayaran, seperti kapal transportasi pesisir, kapal patroli, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), mooring buoy, dan menara suar. • Pembahasan manfaat penguatan sarana pelayaran dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, konektivitas wilayah pesisir, serta pelayanan transportasi masyarakat. • Identifikasi berbagai risiko dan tantangan sektor pelayaran, antara lain kecelakaan pelayaran, keterbatasan infrastruktur, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. • Penyampaian kebutuhan dukungan Badan Pengarah Papua dalam mengawal program prioritas bidang pelayaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya Forum SHEK antara Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya sebagai wadah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam mendukung penguatan sektor transportasi laut dan pelayaran. • Teridentifikasinya kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur dasar pelayaran beserta sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan konektivitas wilayah, keselamatan pelayaran, dan pelayanan transportasi laut di Provinsi Papua Barat Daya.

	• Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan peran dan fungsi kelembagaan BPP sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam percepatan pembangunan Papua, serta menegaskan bahwa BPP bukan merupakan pengelola maupun pelaksana anggaran program, melainkan memberikan arahan strategis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. • Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal usulan program prioritas sektor pelayaran melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya agar menyusun dan menyampaikan usulan program prioritas bidang pelayaran secara terstruktur sebagai bahan pengawalan oleh Badan Pengarah Papua kepada kementerian/lembaga terkait. • Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan mengawal usulan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayaran melalui pelaksanaan fungsi SHEK sesuai kewenangan yang dimiliki. • Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengarah Papua dalam mendukung percepatan pembangunan sektor transportasi laut,

dengan tetap memperhatikan bahwa pembiayaan program menjadi kewenangan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumentasi



Kegiatan 2

Nama Kegiatan	SHEK BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong terkait Usulan Program Bedah Rumah bagi Masyarakat Wilayah 3T
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 25 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga melalui penyediaan hunian yang layak. DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong mengajukan usulan Program Bedah Rumah bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kabupaten Sorong kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Menindaklanjuti permohonan audiensi yang disampaikan, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap usulan program tersebut agar selaras dengan arah kebijakan RIPPP dan RAPPP.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap usulan Program Bedah Rumah. • Menyelaraskan usulan program dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua. • Melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan substansi proposal.

	• Membangun koordinasi antara BP3OKP, Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Penyediaan Perumahan Papua II, dan DPD UKM IKM Nusantara.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Sekretariat BPP Provinsi Papua Barat Daya. • Pokja Papua Produktif. • DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong. • Perwakilan DPD UKM IKM Nusantara Tanah Papua Provinsi Papua Barat Daya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Usulan Program Bedah Rumah bagi masyarakat miskin di wilayah 3T Kabupaten Sorong. • Sinkronisasi usulan program dengan RIPP dan RAPP. • Evaluasi kelengkapan administrasi dan substansi proposal. • Potensi sinergi antara DPD UKM IKM Nusantara, Pemerintah Daerah, Balai Penyediaan Perumahan Papua II, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. • Peluang pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelaksanaan Program Bedah Rumah. • Mekanisme koordinasi lintas instansi sebagai tindak lanjut usulan program.
Hasil Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menerima dan melakukan telaah awal terhadap usulan Program Bedah Rumah yang diajukan oleh DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong.

	• Teridentifikasinya potensi Program Bedah Rumah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan tenaga kerja sektor konstruksi. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan fungsi dan peran kelembagaan sebagai pelaksana Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), serta menegaskan bahwa BPP tidak mengelola maupun menyalurkan anggaran, melainkan mengawal, memfasilitasi koordinasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar usulan program dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, antara lain data calon penerima manfaat yang termasuk dalam desil 1–5, dokumen kepemilikan lahan, serta penyempurnaan kelengkapan administrasi dan kelembagaan organisasi. • Disepakati perlunya koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Balai Penyediaan Perumahan Papua II, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sebagai tindak lanjut pembahasan usulan program.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Melengkapi dokumen administrasi dan substansi proposal, khususnya data calon penerima manfaat, dokumen kepemilikan lahan, serta kelengkapan kelembagaan organisasi. • Menjadwalkan audiensi lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Sorong, Balai Penyediaan

	Perumahan Papua II, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. • Mendorong agar usulan Program Bedah Rumah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan sesuai RIPPP dan RAPPP. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan mengawal proses koordinasi dan penyampaian rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangan yang dimiliki.
Dokumentasi	  

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Pertemuan Lanjutan Pokja Papua Produktif bersama DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong sebagai Tindak Lanjut Pengembangan UMKM dan Ekonomi Produktif
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 30 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Forum Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebelumnya, DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong melakukan pertemuan lanjutan dengan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyerahkan data dan dokumen pendukung usulan program. Pertemuan ini dilaksanakan guna memastikan kelengkapan administrasi dan substansi usulan sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pengawalan dan koordinasi dengan instansi terkait.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap tindak lanjut usulan program DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong, menerima dan melakukan telaah awal terhadap data serta dokumen pendukung yang disampaikan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi produktif di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	Pertemuan dihadiri oleh Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Pokja Papua Produktif, Sekretariat BPP Provinsi Papua Barat Daya, serta

	perwakilan DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	Pembahasan difokuskan pada penyerahan data dan dokumen pendukung usulan program oleh DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong, telaah awal terhadap kelengkapan administrasi dan substansi dokumen, identifikasi dokumen yang masih perlu disempurnakan, serta mekanisme pengawalan usulan program oleh BPP sesuai tugas dan fungsi kelembagaannya.
Hasil Kegiatan	Dalam pertemuan ini, DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong menyerahkan data dan dokumen pendukung sebagai tindak lanjut hasil SHEK sebelumnya. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melakukan telaah awal terhadap dokumen yang disampaikan serta memberikan masukan atas beberapa aspek yang masih perlu dilengkapi. Pada kesempatan tersebut, BPP juga menyampaikan peran dan fungsi kelembagaannya sebagai pelaksana fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), serta menegaskan bahwa BPP tidak mengelola anggaran program, melainkan berperan dalam mengawal, memfasilitasi koordinasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	DPD UKM IKM Nusantara Kabupaten Sorong agar melengkapi dokumen yang masih diperlukan sesuai hasil telaah BPP. Selanjutnya, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan telaah lanjutan terhadap dokumen yang telah dilengkapi sebagai dasar penyusunan rekomendasi serta mengawal proses

	koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangan BPP.
Dokumentasi	

3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK Dinamika Sosial Kemasyarakatan dan Situasi Keamanan di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 4 Juni 2026 di Pos Brimob Ayata, Kabupaten Maybrat
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Situasi keamanan di wilayah Aifat Timur Raya, Kabupaten Maybrat, pasca terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan meninggalnya empat anggota TNI serta dilanjutkan dengan operasi penindakan oleh aparat gabungan TNI/Polri, turut memengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan di sejumlah kampung. Setelah masyarakat kembali dari lokasi pengungsian, masih terdapat berbagai persoalan yang dirasakan terkait aktivitas sehari-hari, pelayanan

	publik, dan hubungan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Sebagai pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Damai melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di Kampung Ayata sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam mendukung terciptanya keamanan yang kondusif sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengidentifikasi kondisi sosial kemasyarakatan pasca konflik di wilayah Aifat Timur Raya. • Menginventarisasi aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan dan pelayanan publik. • Melaksanakan fungsi SHEK sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada pimpinan BPP. • Mendorong terciptanya pendekatan keamanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. • Mendukung terwujudnya Papua Damai sebagai bagian dari percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Personel Pos Brimob Ayata. • Tokoh agama. • Tokoh masyarakat. • Tokoh pemuda Kampung Ayata. • Perwakilan masyarakat sekitar.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Produktif

Poin-Poin Pembahasan	• Dinamika sosial masyarakat pasca kembalinya warga dari lokasi pengungsian. • Kondisi keamanan di wilayah Aifat Timur Raya setelah operasi penegakan hukum oleh aparat TNI/Polri. • Aspirasi masyarakat terkait keberadaan pos-pos pengamanan yang memengaruhi aktivitas berkebun masyarakat di beberapa kampung. • Dampak penggunaan fasilitas pendidikan sebagai pos pengamanan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. • Pentingnya pendekatan yang humanis dan komunikatif dalam pelaksanaan tugas aparat keamanan di wilayah rawan konflik. • Perlunya koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.
Hasil Kegiatan	• Diperoleh informasi mengenai kondisi sosial dan keamanan masyarakat pasca konflik di wilayah Aifat Timur Raya. • Teridentifikasi aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan pengamanan yang masih memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi warga. • Teridentifikasi penggunaan salah satu fasilitas pendidikan sebagai pos pengamanan yang berdampak pada proses belajar mengajar. • Diperoleh masukan mengenai pentingnya pembekalan bagi personel yang bertugas di wilayah konflik agar memahami kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat. • Tersusun bahan awal sebagai masukan kepada pimpinan BPP dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penguatan keamanan

	yang tetap memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mendorong peningkatan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. • Mendorong pemberian pembekalan kepada personel yang akan bertugas di wilayah rawan konflik mengenai karakteristik sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. • Mendorong penyediaan pos pengamanan yang dibangun secara mandiri sehingga tidak menggunakan fasilitas umum masyarakat, khususnya fasilitas pendidikan. • Mendorong pelaksanaan pendekatan keamanan yang humanis dengan tetap memperhatikan kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. • Menyampaikan hasil SHEK kepada Pimpinan BPP sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan instansi terkait dalam rangka mendukung terwujudnya Papua yang aman, damai, dan kondusif.
Dokumentasi	

3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Pendampingan dan Fasilitasi (SHEK) BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam Percepatan Pengembangan dan Penanganan Ruas Jalan Koridor Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 3 Juni 2026, di Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta.
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Pengembangan infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Ruas Jalan Koridor Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef merupakan ruas strategis yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan fasilitasi melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) oleh BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya guna mendukung percepatan penanganan ruas jalan tersebut melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan penanganan ruas Jalan Koridor Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef, memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dengan Direktorat

	Jenderal Bina Marga, serta mengawal usulan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas daerah.
Peserta Kegiatan	Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Maybrat, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, serta pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan pembahasan.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif dan Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	Pembahasan difokuskan pada kondisi eksisting ruas Jalan Koridor Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef, kebutuhan percepatan penanganan infrastruktur jalan, kesiapan dukungan pemerintah daerah, mekanisme pengusulan program kepada pemerintah pusat, serta penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	Melalui pertemuan ini, terbangun koordinasi antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Kabupaten Maybrat, dan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka percepatan pengembangan dan penanganan ruas Jalan Koridor Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan dukungan terhadap usulan pembangunan tersebut melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), serta menegaskan bahwa BPP berperan mengawal dan memfasilitasi koordinasi sesuai kewenangannya, bukan sebagai pelaksana maupun pengelola anggaran pembangunan.

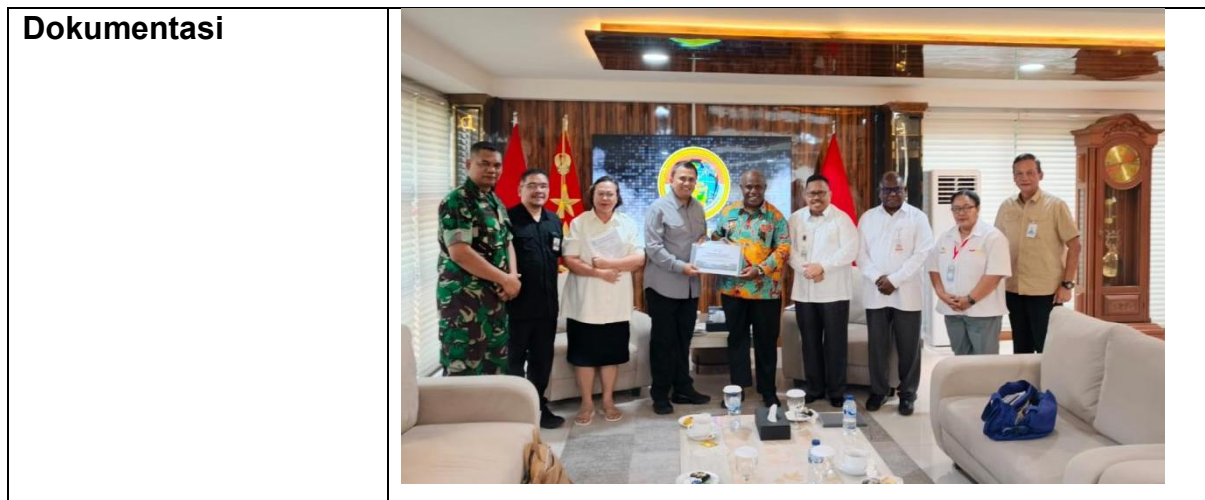
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Pemerintah Kabupaten Maybrat agar melengkapi data teknis dan dokumen pendukung yang diperlukan sebagai dasar pengusulan penanganan ruas jalan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan mengawal proses koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga serta kementerian/lembaga terkait guna mendukung percepatan penanganan ruas Jalan Koridor Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumentasi	

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	SHEK Anggota BPP bersama Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 8 Juni 2026, di Kantor Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Jakarta.
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.

	• Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	• Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua, khususnya di bidang kesehatan, dapat dinilai dari pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). • Percepatan pembangunan di Tanah Papua memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pertahanan dan keamanan, untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan evaluasi pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua. • Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Anggota BPP Papua Barat. • Anggota BPP Papua Selatan. • Wakil Bupati Maybrat. • Anggota Pokja Papua Sehat BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Bapak Otten Simbolon. • Direktur A BAIS. • Bagian Hukum BAIS.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Damai/Polhukam.
Poin-Poin Pembahasan	• Alur pelayanan kesehatan di puskesmas.

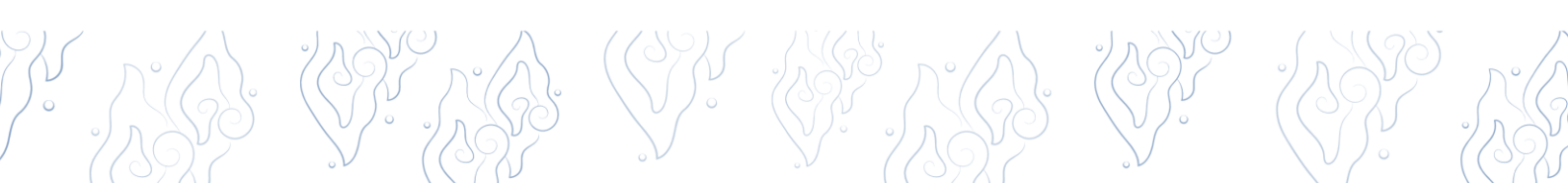
	• Hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. • Harapan terhadap peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. • Penyampaian kondisi dan situasi di Tanah Papua oleh pimpinan BPP dari tiga wilayah. • Penyampaian permasalahan di Kabupaten Maybrat oleh Wakil Bupati Maybrat. • Tanggapan dan masukan dari BAIS TNI.
Hasil Kegiatan	• Teridentifikasinya kondisi sarana dan prasarana puskesmas sebagai bagian dari hasil evaluasi lapangan. • Ditemukan bahwa masih terdapat tenaga kesehatan Orang Asli Papua yang belum dioptimalkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikannya. • Aspek keamanan masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah. • Terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Menyusun perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan data yang akurat dan memperhatikan isu-isu strategis di daerah. • Mendorong upaya membuka keterisolasian wilayah guna meningkatkan akses pelayanan dasar. • Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. • Memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.



Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Koordinasi Awal Pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 8 Juni 2026 di Kabupaten Maybrat
IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
Latar Belakang	Percepatan pembangunan di Tanah Papua memerlukan pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pembangunan dari tingkat kampung melalui pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif sebagai pusat pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal. Kampung Ayata memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta nilai-nilai sosial budaya yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian,

	masih terdapat berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, produktivitas ekonomi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan kampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melalui peran BPP dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, serta mitra pembangunan. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan dapat terbangun model pembangunan kampung yang mendukung terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan Harmonisasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis kampung melalui pendekatan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. • Mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan di Kampung Ayata sebagai dasar penyusunan program prioritas. • Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung, lembaga adat, gereja, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan kampung.



	• Menyusun rekomendasi program yang selaras dengan arah kebijakan Otonomi Khusus Papua dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. • Mendorong pemberdayaan masyarakat kampung melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan ekonomi berbasis potensi lokal.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Pemerintah Distrik Aifat Timur Tengah. • Pemerintah Kampung Ayata. • Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta Dinas Koperasi dan UMKM. • Tokoh adat. • Tokoh agama. • Tokoh perempuan dan pemuda. • Kelompok tani, pelaku UMKM, dan masyarakat. • Universitas Papua (UNIPA) sebagai perguruan tinggi dan mitra pembangunan.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	A. Papua Sehat • Penguatan pelayanan kesehatan primer di tingkat kampung. • Pencegahan dan penanganan stunting. • Penyediaan air bersih dan sanitasi layak. • Peningkatan gizi keluarga dan ketahanan pangan lokal. • Penguatan Posyandu, kader kesehatan, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

	B. Papua Cerdas • Peningkatan mutu pendidikan dasar. • Penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. • Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) serta pembelajaran kontekstual berbasis budaya lokal. • Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. • Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. C. Papua Produktif • Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu. • Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua. • Hilirisasi komoditas unggulan kampung. • Penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi kampung. • Pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda. D. Peran BPP • Sinkronisasi program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. • Harmonisasi kebijakan pembangunan kampung. • Koordinasi antar pemangku kepentingan. • Evaluasi pelaksanaan program prioritas. • Penyusunan rekomendasi percepatan pembangunan kampung sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus Papua.
Hasil Kegiatan	• Terbangun komitmen bersama untuk menjadikan Kampung Ayata sebagai model pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kabupaten Maybrat.

	• Teridentifikasi kebutuhan prioritas pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan program pembangunan. • Terpetakan potensi unggulan kampung yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. • Meningkatnya sinergi antara BPP, Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Kampung Ayata, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kampung. • Tersusunnya rekomendasi program prioritas sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. • Terbangunnya mekanisme koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif secara berkelanjutan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menetapkan Kampung Ayata sebagai lokasi percontohan (pilot project) pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kabupaten Maybrat. • BPP memfasilitasi sinkronisasi program kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat agar lebih terintegrasi di tingkat kampung. • Pemerintah Kabupaten Maybrat mengintegrasikan hasil kegiatan ke dalam RKPD, Renja OPD, RKP Kampung, dan APB Kampung. • Mendorong pelaksanaan program lintas sektor yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat.

	• Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi bersama dengan indikator Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai dasar pengukuran kinerja pembangunan kampung. • Mendorong replikasi model pembangunan Kampung Ayata pada kampung-kampung lain di Kabupaten Maybrat sebagai bagian dari percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua.
Dokumentasi	

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	SHEK BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Gubernur Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 17 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Pertemuan antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat Daya dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka membahas konsep Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024, serta tindak lanjut rencana Nota Kesepahaman

	(Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BPP dalam mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan pembangunan di bidang pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Melakukan koordinasi terkait konsep Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) di Provinsi Papua Barat Daya. • Membahas tindak lanjut rencana Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA). • Memperkuat sinergi antara BPP, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Universitas Papua dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia.
Peserta Kegiatan	Pertemuan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya, Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Sekretariat BPP, serta perangkat daerah terkait sesuai materi pembahasan.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Konsep Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) di Provinsi Papua Barat Daya sesuai amanat PMK Nomor 33 Tahun 2024. • Tindak lanjut rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA).

	• Persiapan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA). • Penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, BPP, dan Universitas Papua dalam mendukung percepatan pembangunan bidang pendidikan.
Hasil Kegiatan	• Konsep Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) di Provinsi Papua Barat Daya sesuai amanat PMK Nomor 33 Tahun 2024. • Tindak lanjut rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA). • Persiapan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA). • Penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, BPP, dan Universitas Papua dalam mendukung percepatan pembangunan bidang pendidikan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Terlaksananya koordinasi mengenai konsep Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari pelaksanaan amanat PMK Nomor 33 Tahun 2024. • Disepakati tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA) sebagai bentuk penguatan kerja sama dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia. • Disepakati bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA)

	akan dilaksanakan pada 20 Juni 2026 di Universitas Papua, Manokwari.
Dokumentasi	 

Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Focus Group Discussion (FGD) Papeda Summit 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 18 Juni 2026 di Hotel Vega Sorong
IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
Latar Belakang	Papeda Summit Tahun 2026 merupakan forum strategis yang mempertemukan para gubernur se-

	Tanah Papua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membahas pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua melalui kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaan Papeda Summit berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka mendukung persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026. • Mengikuti proses persiapan Papeda Summit sebagai bagian dari dukungan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua. • Memberikan masukan terkait implementasi tata kelola pemerintahan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). • Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan masyarakat adat.
Peserta Kegiatan	• Perwakilan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota Pokja Papua Damai/Polhukam). • Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. • Perwakilan Polda Papua Barat Daya.

	Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain BPBD-Damkar, DPMPTSP, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat Daya. Perwakilan mitra pembangunan dan organisasi nonpemerintah, antara lain Yayasan EcoNusa dan Alam Nusantara.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif dan Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	- Penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong sebagai tuan rumah Papeda Summit 2026. - Pembahasan konsep, agenda, dan mekanisme pelaksanaan Papeda Summit 2026. - Penyusunan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. - Paparan Yayasan EcoNusa mengenai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan penguatan hak masyarakat adat. - Rencana peluncuran berbagai inisiatif strategis, antara lain Cenderawasih Trust Fund, Tong Belajar, dan Kawasan Ekonomi Restoratif. - Keterlibatan BPP sebagai narasumber pada sesi Implementasi Tata Kelola Pemerintahan dan RIPPP. Persiapan aspek pengamanan, publikasi, pembiayaan, serta pembagian tugas kepanitiaan.
Hasil Kegiatan	Terbangunnya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan mengenai Papeda Summit 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

	• Konsep penyelenggaraan Papeda Summit memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah kegiatan. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya diberikan peran sebagai narasumber pada sesi Implementasi Tata Kelola Pemerintahan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), sebagai bentuk kontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. • Disepakati percepatan penyusunan Surat Keputusan (SK) Gubernur serta pembagian tugas kepanitiaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Papeda Summit. Seluruh instansi dan mitra pembangunan menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Papeda Summit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mempercepat finalisasi dan penetapan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Panitia Papeda Summit 2026. • Menyiapkan materi BPP mengenai implementasi tata kelola pemerintahan dan RIPPP sebagai bahan paparan pada Papeda Summit. • Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, Yayasan EcoNusa, serta seluruh mitra pembangunan dalam mendukung pelaksanaan Papeda Summit. • Memastikan kesiapan aspek teknis, keamanan, publikasi, dan pembiayaan sebelum pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala hingga pelaksanaan Papeda Summit pada September 2026,

	termasuk pembentukan sekretariat dan panitia kecil sebagai bagian dari persiapan kegiatan.
Dokumentasi	-

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	SHEK BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Bupati Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 18 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Pertemuan antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut atas surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor B-02/SWP/D-3/KN.01.00/05/2026 tanggal 19 Mei 2026 mengenai permohonan dan pengaduan terkait hak ulayat atas tanah adat Pulau Gag, yang diteruskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi antara BPP dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung penyelesaian berbagai isu strategis secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).

	• Membahas berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. • Menindaklanjuti surat Sekretariat Wakil Presiden terkait pengaduan hak ulayat atas tanah adat Pulau Gag sesuai kewenangan pemerintah daerah. • Memperkuat koordinasi antara BPP dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung percepatan pembangunan dan penyelesaian isu strategis di daerah.
Peserta Kegiatan	• Bupati Raja Ampat. • Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Pokja BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	Pokja Sehat, Pokja Cerdas, Pokja Produktif, Pokja Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. • Tindak lanjut surat Sekretariat Wakil Presiden mengenai pengaduan hak ulayat atas tanah adat Pulau Gag. • Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penguatan koordinasi antara BPP dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung percepatan pembangunan dan penyelesaian isu-isu strategis di daerah.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya koordinasi antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.

	• Terbangunnya kesamaan pemahaman mengenai tindak lanjut surat Sekretariat Wakil Presiden terkait pengaduan hak ulayat atas tanah adat Pulau Gag sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. • Disepakati pentingnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan pembangunan daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menindaklanjuti surat Sekretariat Wakil Presiden sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fungsi pengawalan melalui Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap tindak lanjut penyelesaian isu strategis di Kabupaten Raja Ampat. • Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelesaian permasalahan hak masyarakat adat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.
Dokumentasi	



Kegiatan 7

Nama Kegiatan	SHEK Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG Aimas, Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 19 Juni 2026 di SPPG Aimas dan SPPG Malawili, Kabupaten Sorong
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam

	rangka pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sorong guna memperoleh informasi lapangan, mengidentifikasi tantangan pelaksanaan program, serta menghimpun masukan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan Program MBG. • Memperoleh informasi dan data lapangan terkait pelaksanaan Program MBG. • Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan Program MBG. • Menghimpun masukan dari pengelola SPPG dan pemangku kepentingan sebagai bahan pelaksanaan SHEK.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Sorong. • Kepala/Pengelola SPPG Aimas. • Tenaga Ahli Gizi dan pengelola operasional SPPG.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif.
Poin-Poin Pembahasan	• Pelaksanaan Program MBG pada SPPG Aimas, termasuk cakupan penerima manfaat dan mekanisme distribusi. • Ketersediaan sarana, prasarana, serta standar operasional penyelenggaraan SPPG.

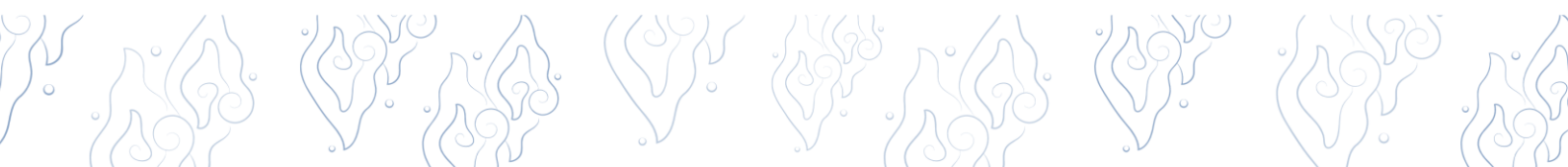
	• Pemanfaatan bahan pangan lokal dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok Program MBG. • Kondisi ketenagakerjaan, termasuk pelibatan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). • Aspek keamanan pangan, sanitasi, pengelolaan limbah, serta pengawasan mutu makanan. • Dukungan pemerintah daerah dan perangkat daerah teknis dalam pelaksanaan Program MBG. • Kendala operasional, terutama akses pelayanan ke wilayah yang masih sulit dijangkau.
Hasil Kegiatan	• Program MBG pada SPPG Aimas telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari masyarakat. • Standar kebersihan, sanitasi, serta pengelolaan gizi telah diterapkan dengan baik, namun masih diperlukan penyusunan SOP penerimaan bahan baku dan SOP mitigasi keracunan makanan. • Pemanfaatan bahan pangan lokal telah dilaksanakan, namun masih belum optimal karena sebagian kebutuhan pangan masih dipasok dari luar daerah. • Masih terdapat wilayah yang belum dapat dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur jalan serta beberapa SPPG yang masih berstatus suspend. • Keterlibatan perangkat daerah teknis dalam mendukung rantai pasok dan penguatan Program MBG masih perlu ditingkatkan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mendorong penyusunan SOP penerimaan bahan baku dan SOP mitigasi keracunan makanan oleh Badan Gizi Nasional. • Mendorong peningkatan pemanfaatan bahan pangan lokal dan pelibatan petani, peternak,

	nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok Program MBG. • Mendorong percepatan operasional SPPG pada wilayah 3T dan perluasan cakupan pelayanan ke wilayah yang belum terlayani. • Meningkatkan koordinasi dan peran perangkat daerah teknis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG. • Mendorong penyediaan sistem pengukuran dampak Program MBG terhadap status gizi, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.
Dokumentasi	 The top photograph shows a group of approximately ten people, including men and women, seated in a circle on the floor in a room with blue walls. They appear to be engaged in a discussion or meeting. Some are holding papers or notebooks. A small wooden table with water bottles is in the center. The bottom photograph shows a group of about twelve people standing in a line in front of a building. Above the entrance is a sign that reads "SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI" (Food Fulfillment Service Unit). The group consists of men and women of various ages, some holding certificates or documents. A red motorcycle is parked on the left side of the building.



Kegiatan 8

Nama Kegiatan	SHEK BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Program SKALA terkait Penguatan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) Data OAP Terpilah di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 19 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya



IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Dalam rangka mendukung implementasi Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB), diperlukan ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, mutakhir, dan terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan di Tanah Papua. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengembangkan Sistem Informasi Orang Asli Papua Papua Barat Daya (SIOPADA) sebagai inovasi daerah yang diharapkan mampu menyediakan data OAP hingga tingkat kampung. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengikuti pembahasan ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), serta memberikan masukan strategis dalam mendukung penguatan tata kelola data OAP.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Memperoleh informasi mengenai perkembangan pengembangan SIOPADA sebagai bagian dari implementasi PPSB Data OAP Terpilah. • Mengidentifikasi dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan pendataan OAP di Provinsi Papua Barat Daya. • Menyiapkan masukan kepada Pimpinan BPP sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam penguatan kebijakan pendataan OAP.

Peserta Kegiatan	• Pimpinan dan Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Pokja Papua Damai. • Perwakilan Program SKALA. • Perangkat Daerah terkait.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi.
Misi/Keterangan	apua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai.
Poin-Poin Pembahasan	• Pemaparan konsep dan manfaat SIOPADA sebagai sistem pendataan Orang Asli Papua yang terintegrasi. • Mekanisme pendataan melalui kader kampung yang diverifikasi bersama BPS dan Dukcapil. • Rencana pembentukan sekretariat bersama lintas perangkat daerah dalam pengelolaan data OAP. • Dukungan pendanaan melalui skema cost sharing antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah kampung. • Persiapan penyusunan Peraturan Gubernur dan pelaksanaan launching SIOPADA. • Integrasi SIOPADA dengan Portal Cenderawasih sebagai bagian dari penguatan Satu Data Papua Barat Daya. • Pemanfaatan mahasiswa KKN dalam mendukung proses pendataan di lapangan.
Hasil Kegiatan	• SIOPADA dinilai sebagai inovasi strategis dalam mendukung penyediaan data OAP terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pendataan OAP secara bertahap mulai Tahun 2027.

	• Disepakati perlunya penyampaian konsep SIOPADA kepada Gubernur Papua Barat Daya sebelum pelaksanaan launching. • Disepakati bahwa pengembangan SIOPADA akan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kampung, perguruan tinggi, BPS, Dukcapil, dan mitra pembangunan. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan menyiapkan catatan dan rekomendasi sebagai bahan arahan kepada Gubernur Papua Barat Daya dalam mendukung implementasi PPSB Data OAP Terpilah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyampaikan hasil pembahasan kepada Pimpinan BPP sebagai bahan masukan kepada Gubernur Papua Barat Daya. • Mendorong percepatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan SIOPADA. • Mendukung pengalokasian anggaran pendataan OAP dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. • Mendorong pembentukan kelembagaan pendataan hingga tingkat kampung guna menjamin pembaruan data secara berkelanjutan. • Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BPS, Dukcapil, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dalam mendukung implementasi SIOPADA. • Mengawal persiapan launching SIOPADA serta integrasinya dengan Portal Cenderawasih sebagai bagian dari penguatan tata kelola Satu Data Papua Barat Daya.
Dokumentasi	-

Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Peran Serta BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 23 Juni 2026 di Hotel Suni Abepura, Jayapura
IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
Latar Belakang	Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Papua diselenggarakan sebagai forum untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menjadi media berbagi praktik baik (best practices) antar daerah di wilayah Papua. Keikutsertaan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. • Mengikuti kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Papua sebagai sarana berbagi praktik baik pembangunan daerah. • Memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua. • Menghimpun informasi dan pengalaman daerah sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.

Peserta Kegiatan	• Perwakilan Kementerian Dalam Negeri. • Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Tanah Papua. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi, Harmonisasi
Misi/Keterangan	RIPPP
Poin-Poin Pembahasan	• Penyampaian kebijakan pemerintah terkait peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Paparan praktik baik (best practices) pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. • Penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. • Pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hasil Kegiatan	• Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan di wilayah Papua. • Diperolehnya informasi mengenai berbagai praktik baik dan inovasi pemerintah daerah yang dapat menjadi referensi dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. • Menguatnya komitmen untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan di Tanah Papua.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. • Mendorong adopsi praktik-praktik baik yang relevan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. • Menindaklanjuti hasil koordinasi sebagai bahan pelaksanaan tugas dan fungsi BPP melalui kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Dokumentasi	



Kegiatan 10

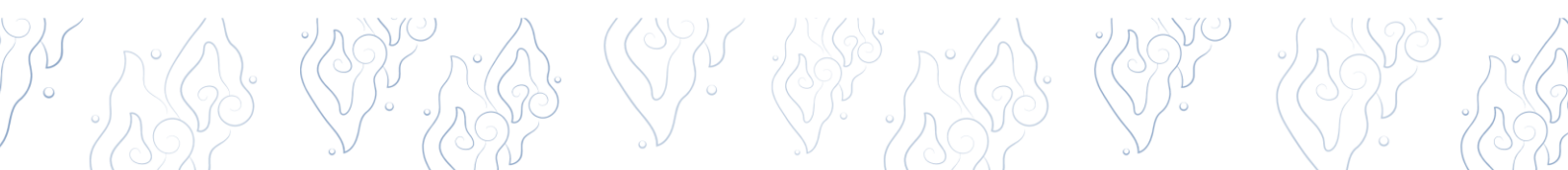
Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Kegiatan Kunjungan dan Penilaian (Assessment) Awal Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu-Jum'at, 24-26 Juni 2026 di Kampung Ayata, Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua dilaksanakan melalui tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang didukung oleh kondisi keamanan dan harmoni sosial agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Kampung Ayata merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Maybrat yang berada pada daerah dengan kerawanan konflik sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat serta menghilangkan stigma sebagai "wilayah merah".

	Percepatan pembangunan berbasis kampung memerlukan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan didukung oleh perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kunjungan dan assessment awal sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna memperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan kampung, serta kondisi keamanan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan model Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Melaksanakan assessment awal terhadap kondisi Kampung Ayata pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, tata kelola kampung, dan keamanan. • Mengidentifikasi potensi, permasalahan, kebutuhan, dan peluang pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif. • Membangun komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. • Menyusun rekomendasi awal sebagai dasar sinkronisasi program lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis kampung.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Pemerintah Kabupaten Maybrat. • Pemerintah Distrik Aifat Timur Tengah.

	• Pemerintah Kampung Ayata. • Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat. • Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat. • Dinas P2KB Kabupaten Maybrat. • Tenaga kesehatan Puskesmas. • Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. • Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat Kampung Ayata. • Kelompok tani dan pelaku UMKM. • Universitas Papua. • Prof. Sepus Fatem. • Pastor Paroki. • Anggota Pokja Papua Sehat. • Anggota Pokja Papua Produktif. • Calon Anggota Pokja Papua Damai.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai.
Poin-Poin Pembahasan	• Persiapan implementasi Program Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kampung Ayata. • Aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang berpihak kepada Orang Asli Papua serta penghapusan stigma "wilayah merah". • Pengembangan komoditas dan tanaman produktif sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. • Edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan, pendidikan, dan peningkatan produktivitas. • Pelaksanaan assessment terhadap kondisi pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi,

	infrastruktur, tata kelola kampung, dan kondisi keamanan. • Strategi pengembangan Kampung Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pencegahan stunting, penyediaan air bersih, sanitasi, PHBS, dan ketahanan pangan keluarga. • Strategi pengembangan Kampung Cerdas melalui peningkatan mutu pendidikan, literasi, numerasi, pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, dan pembelajaran berbasis budaya lokal. • Strategi pengembangan Kampung Produktif melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM Orang Asli Papua, koperasi kampung, hilirisasi komoditas unggulan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. • Peran BPP dalam melaksanakan SHEK, memfasilitasi sinkronisasi program lintas sektor, mengharmonisasikan kebijakan pembangunan, serta menyusun rekomendasi percepatan pembangunan Kampung Ayata.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya assessment awal secara partisipatif terhadap kondisi Kampung Ayata. • Teridentifikasinya potensi unggulan serta permasalahan prioritas pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan keamanan. • Terpetakannya kebutuhan program lintas sektor sebagai dasar pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif. • Terbangunnya komitmen bersama antara BPP, Pemerintah Kabupaten Maybrat, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan Kampung Ayata.

	• Tersusunnya rekomendasi awal sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua. • Teridentifikasinya peluang pengembangan Kampung Ayata sebagai pilot project Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kabupaten Maybrat. • Terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung pembangunan Kampung Ayata melalui pendekatan yang humanis dengan menghilangkan stigma sebagai "wilayah merah".
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif berdasarkan hasil assessment. • Memfasilitasi sinkronisasi program kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam mendukung pengembangan Kampung Ayata. • Mengintegrasikan hasil assessment ke dalam dokumen perencanaan daerah dan kampung. • Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan, mutu pendidikan, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program. • Mengembangkan Kampung Ayata sebagai pilot project yang dapat direplikasi pada kampung lain di Provinsi Papua Barat Daya. • Melaksanakan kunjungan lanjutan pada Agustus 2026 untuk menindaklanjuti hasil assessment dan penyusunan rencana aksi pengembangan Kampung Ayata.



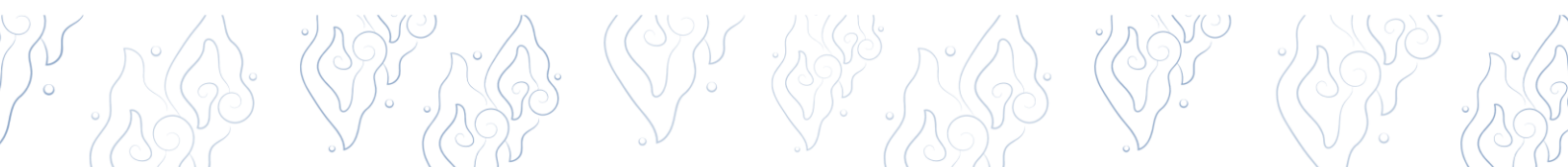
Dokumentasi



Kegiatan 11

Nama Kegiatan

Pertemuan Koordinasi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Dinas Lingkungan Hidup,



	Kehutanan, dan Pertanian (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat, 26 Juni 2026, di Sekretariat BPP Provinsi Papua Barat Daya.
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Papeda Summit 2026 merupakan agenda strategis yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan secara optimal. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) BPP dalam mendukung persiapan kegiatan, penguatan sinergi antarlembaga, serta pembahasan isu-isu strategis terkait masyarakat adat, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mendukung koordinasi persiapan pelaksanaan Papeda Summit 2026. • Memberikan masukan terhadap isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Papeda Summit 2026. • Mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan. • Memperkuat peran BPP dalam mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adat serta pembangunan berkelanjutan.
Peserta Kegiatan	• Pimpinan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Anggota Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Damai/Polhukam. • Perwakilan Yayasan EcoNusa.

	• Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif dan Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Persiapan pelaksanaan Papeda Summit 2026, termasuk penyusunan Surat Keputusan (SK) Panitia. • Dukungan BPP Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPP Papua Tengah. • Pentingnya pelaksanaan pemetaan partisipatif sebagai upaya menjamin kepastian hak atas tanah adat serta meminimalkan potensi konflik agraria. • Peran Pokja Papua Damai/Polhukam dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy), pelibatan masyarakat adat, serta penyampaian materi mengenai RIPPP dan pembangunan berbasis masyarakat adat.
Hasil Kegiatan	• Terbangunnya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah persiapan pelaksanaan Papeda Summit 2026. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Papeda Summit melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), serta siap memfasilitasi koordinasi lintas daerah sesuai kewenangannya. • Disepakati pentingnya pelaksanaan pemetaan partisipatif sebagai salah satu instrumen dalam mendukung perlindungan hak masyarakat adat dan mencegah potensi konflik agraria.

	• Terbangunnya komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan mitra pembangunan dalam mendukung pelaksanaan Papeda Summit 2026. • Pokja Papua Damai/Polhukam dan Pokja Papua Produktif menyatakan kesiapan memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menyukseskan Papeda Summit 2026.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mempercepat penyelesaian Surat Keputusan (SK) Panitia Papeda Summit 2026. • Melaksanakan koordinasi lanjutan dengan BPP Papua Tengah terkait agenda pertemuan bersama Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua. • Menyiapkan materi narasumber serta pembagian tugas masing-masing Pokja sesuai bidang tugasnya. • Mendorong pelibatan aktif masyarakat adat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan Papeda Summit 2026. • Melaksanakan koordinasi dan monitoring secara berkala guna memastikan seluruh tahapan persiapan kegiatan berjalan sesuai rencana.
Dokumentasi	



Kegiatan 12

Nama Kegiatan	SHEK dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kondisi Pasca Kebakaran di Lokus Klademak II, Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 26 Juni 2026 di Klademak Kota Sorong
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua. • Indeks Pelaksanaan Publikasi Program/Kegiatan.
Latar Belakang	Pada tanggal 24 Juni 2026 terjadi kebakaran di kawasan Klademak II Pantai, Kota Sorong, yang menghanguskan sekitar 175 unit rumah, 2 unit perahu nelayan, dan berdampak kepada sekitar 680 jiwa. Selain menimbulkan kerusakan permukiman dan hilangnya mata pencaharian masyarakat, kejadian ini juga memunculkan berbagai persoalan lanjutan, antara lain keterbatasan akses air bersih, kebutuhan hunian

	sementara, distribusi bantuan yang belum merata, serta potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat terdampak, mengidentifikasi kebutuhan prioritas, serta menghimpun masukan sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur akibat kebakaran. • Mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat terdampak sebagai bahan penyusunan rekomendasi penanganan pascabencana. • Melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pemulihan permukiman, pelayanan dasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat. • Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Pokja Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai. • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. • Pemerintah Kota Sorong. • Dinas Sosial Provinsi dan Kota Sorong. • Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Sorong.

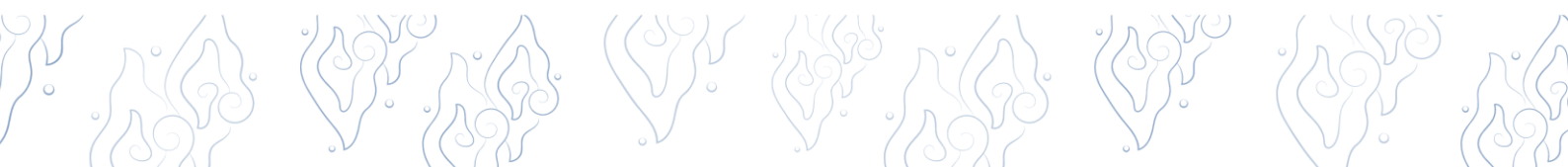
	• Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong. • Puskesmas Malawei. • TNI AL, Polairud, dan Brimob. • Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, relawan, dan organisasi sosial.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Kondisi masyarakat dan permukiman pascakebakaran. • Pendataan jumlah rumah dan warga terdampak. • Kebutuhan pelayanan dasar, meliputi air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan pelayanan kesehatan. • Pemulihan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan yang kehilangan perahu dan alat kerja. • Distribusi bantuan logistik serta validasi data penerima bantuan. • Kondisi keamanan di lokasi pengungsian dan kawasan terdampak. • Potensi konflik sosial serta upaya menjaga kondusivitas masyarakat. • Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak. • Pembahasan kronologi kejadian kebakaran berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan identifikasi awal.
Hasil Kegiatan	• Teridentifikasinya kondisi riil masyarakat terdampak beserta kebutuhan prioritas pascakebakaran.

	• Pelayanan kesehatan, bantuan logistik, makanan, obat-obatan, tenda pengungsian, dan distribusi air bersih telah diberikan oleh pemerintah bersama TNI/Polri dan berbagai pihak. • Teridentifikasinya kebutuhan percepatan pembangunan hunian sementara, rehabilitasi rumah, dan pemulihan mata pencaharian masyarakat nelayan. • Ditemukan masih adanya keterbatasan pengamanan di kawasan terdampak, terutama pada malam hari. • Ditemukan perlunya validasi dan pemutakhiran data korban agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. • Teridentifikasinya potensi konflik sosial akibat perbedaan persepsi penyebab kebakaran serta ketimpangan distribusi bantuan yang memerlukan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. • Teridentifikasinya perlunya penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan posko terpadu sebagai pusat koordinasi penanganan pascabencana. • Tersusunnya rekomendasi awal sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Membentuk sekretariat atau posko terpadu sebagai pusat koordinasi penanganan pascabencana dan distribusi bantuan lintas sektor. • Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data seluruh masyarakat terdampak sebagai dasar pemberian bantuan rehabilitasi.

	• Mempercepat penyediaan air bersih, pembangunan hunian sementara, serta rehabilitasi permukiman masyarakat. • Mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana produksi bagi nelayan dan pelaku usaha terdampak. • Meningkatkan pengamanan di kawasan terdampak untuk mencegah tindak kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan. • Memperkuat komunikasi dan mediasi melalui tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna mencegah konflik sosial. • Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan secara terpadu, termasuk kajian kelayakan pembangunan kembali atau relokasi apabila diperlukan. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pemulihan masyarakat pascakebakaran.
Dokumentasi	-

Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Pendampingan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam Kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi Program Kampung KB Produktif di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Selasa, 29-30 Juni 2026 di Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat
IKU	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.



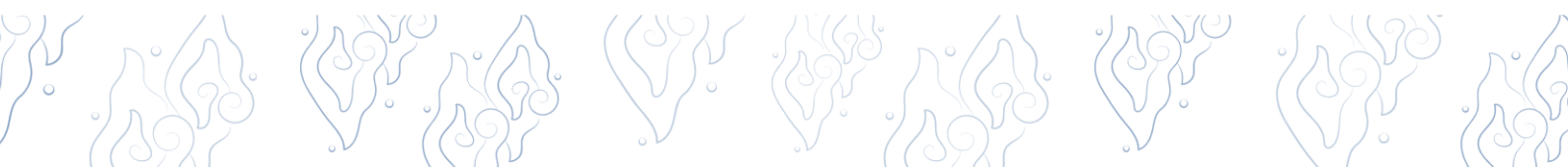
Latar Belakang	Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan salah satu strategi nasional dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Maybrat, implementasi Program Kampung KB memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi model pembangunan kampung yang tidak hanya berorientasi pada keluarga berkualitas, tetapi juga mendukung terwujudnya Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif. Sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pembangunan kampung perlu dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap berbagai program prioritas agar pelaksanaannya saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Pendampingan dan sosialisasi di Kampung Ayata dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Program Kampung KB Produktif, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengidentifikasi peluang integrasi program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai bagian dari
------------------------------	---

	upaya mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung pengembangan Program Kampung KB Produktif. • Mendampingi Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan Program Kampung KB Produktif di Kampung Ayata. • Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep Kampung KB Produktif sebagai pusat pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. • Mendorong integrasi Program Kampung KB dengan program Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif. • Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung, serta mitra pembangunan. • Mengidentifikasi kebutuhan serta menyusun rekomendasi program prioritas yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kampung Ayata.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Pokja Papua Produktif). • Pemerintah Kabupaten Maybrat. • Dinas P2MKB Kabupaten Maybrat. • Pemerintah Distrik Aifat Timur Tengah. • Pemerintah Kampung Ayata. • Petugas Penyuluh KB. • Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi.

Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif.
Poin-Poin Pembahasan	1. Sosialisasi Program Kampung KB Produktif, meliputi: • Tujuan dan manfaat Program Kampung KB. • Penguatan pembangunan keluarga berkualitas. • Peran masyarakat dalam mendukung Program Kampung KB. 2. Penguatan Papua Sehat, meliputi: • Peningkatan kesehatan ibu dan anak. • Pencegahan stunting. • Pelayanan kesehatan dasar. • Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). • Ketahanan pangan dan gizi keluarga. 3. Penguatan Papua Cerdas, meliputi: • Penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak. • Literasi keluarga. • Pencegahan putus sekolah. • Pendidikan karakter dan pola pengasuhan anak. • Peningkatan kapasitas generasi muda. 4. Penguatan Papua Produktif, meliputi: • Pemberdayaan ekonomi keluarga. • Pengembangan UMKM Orang Asli Papua. • Pertanian keluarga dan pemanfaatan pekarangan. • Pengembangan koperasi dan usaha bersama. • Hilirisasi komoditas lokal serta peningkatan pendapatan masyarakat. 5. Peran BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, meliputi: • Memfasilitasi sinkronisasi Program Kampung KB dengan program pembangunan daerah. • Mengharmonisasikan kebijakan dan program lintas sektor.

	• Mengoordinasikan kolaborasi antarperangkat daerah, pemerintah kampung, dan mitra pembangunan. • Mengidentifikasi kebutuhan, kendala, dan peluang pengembangan Program Kampung KB Produktif. • Menyusun rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya pendampingan dan sosialisasi Program Kampung KB Produktif kepada masyarakat Kampung Ayata. • Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan kampung. • Teridentifikasinya potensi integrasi Program Kampung KB dengan program kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. • Terbangunnya komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Kampung Ayata, masyarakat, dan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung implementasi Program Kampung KB Produktif. • Tersusunnya rekomendasi awal untuk sinkronisasi program lintas sektor sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. • Menguatnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung terwujudnya Kampung Ayata sebagai kampung yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun rencana aksi terpadu pengembangan Kampung KB Produktif yang mengintegrasikan sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan ekonomi masyarakat.

	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi sinkronisasi program antara kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Maybrat, dan Pemerintah Kampung Ayata agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung. • Pemerintah Kabupaten Maybrat mengintegrasikan Program Kampung KB Produktif ke dalam dokumen perencanaan daerah, Renja OPD, RKP Kampung, dan APB Kampung. • Memperkuat kapasitas kader Kampung KB, kader Posyandu, PKK, dan kelompok masyarakat sebagai penggerak pembangunan keluarga dan ekonomi produktif. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator pembangunan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai dasar perbaikan program. • Mengembangkan Kampung Ayata sebagai model integrasi Program Kampung KB Produktif dengan konsep Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, sehingga dapat direplikasi di kampung-kampung lain di Kabupaten Maybrat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	





Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam Kegiatan Kebaktian Tahunan Nasional (KTN) YPPH Batu dan Seminar Wawasan Kebangsaan sebagai Upaya Penguatan Harmoni Sosial serta Penguatan Jejaring Strategis dalam Mendukung Percepatan Pembangunan di Tanah Papua.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Selasa, 29-30 Juni 2026 di Batu Malang
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.

Latar Belakang	Percepatan pembangunan di Tanah Papua memerlukan dukungan stabilitas sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan berbagai mitra pembangunan. Kebaktian Tahunan Nasional (KTN) YPPH Batu dan Seminar Wawasan Kebangsaan menjadi wadah strategis untuk memperkuat harmoni sosial, meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan, serta membangun jejaring kemitraan yang dapat mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Dalam kegiatan ini, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya berpartisipasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Mengikuti forum penguatan wawasan kebangsaan dan harmoni sosial. • Memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua. • Mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Perwakilan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Pengurus dan peserta Kebaktian Tahunan Nasional YPPH Batu. • Perwakilan kementerian/lembaga. • Tokoh agama. • Akademisi.

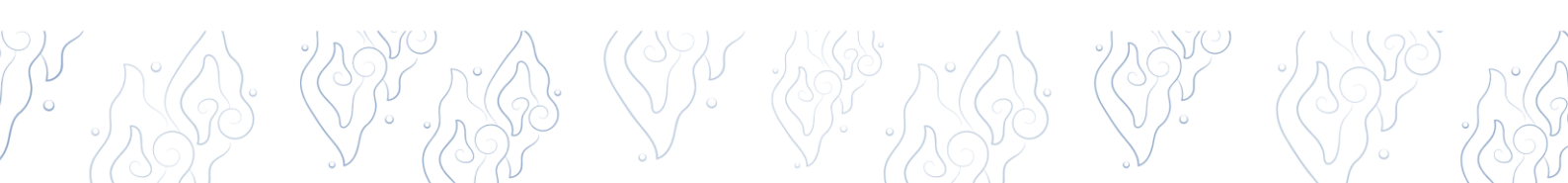
	• Organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi pembangunan yang inklusif. • Peran tokoh agama dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan. • Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua. • Pengembangan jejaring kemitraan antara pemerintah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. • Pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial yang kondusif sebagai prasyarat percepatan pembangunan.
Hasil Kegiatan	• Terbangunnya komunikasi dan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat nasional. • Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua. • Diperolehnya berbagai masukan dan praktik baik yang dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Menguatnya komitmen untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan mitra strategis yang terbangun selama kegiatan.

	• Mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan harmoni sosial dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. • Mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat mendukung pelaksanaan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) dan implementasi RPPPP serta RAPPP. • Menyampaikan hasil kegiatan kepada pimpinan BPP sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan dan kemitraan strategis.
Dokumentasi	

KEGIATAN INTERNAL

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Pengarahan Hak, Kewajiban, dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kepada Anggota Pokja BPP Rekrutmen Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 11 Juni 2026 Daring (Zoom Meeting)
IKU	• Indeks Pemenuhan Pembelajaran. • Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.



	• Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua. • Indeks Kepatuhan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Kegiatan.
Latar Belakang	Percepatan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat serta sumber daya manusia yang profesional. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), Sekretariat Badan Pengarah Papua menyelenggarakan pengarahan kepada Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026 untuk memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja, tata kelola organisasi, serta pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi mengenai disiplin kerja, mekanisme pelaporan, administrasi kegiatan, dan penerapan Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-1/SETBPP/JYP/2026 sebagai pedoman dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, tugas pokok, dan fungsi Anggota Pokja BPP. • Menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).

	• Meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Pokja. • Menjelaskan mekanisme kerja, pelaporan, administrasi, serta hak dan fasilitas anggota Pokja. • Mempersiapkan anggota Pokja dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	• Pimpinan dan Sekretariat Badan Pengarah Papua. • Anggota Pokja Rekrutmen Tahun 2026 dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. • Perwakilan BP3OKP di wilayah Papua. • Narasumber dari Sekretariat BPP dan instansi terkait.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai.
Poin-Poin Pembahasan	• Tugas dan peran Pokja dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK BP3OKP. • Hak, kewajiban, disiplin kerja, dan mekanisme kehadiran anggota Pokja. • Ketentuan honorarium, perjalanan dinas, fasilitas, dan jaminan kesehatan anggota Pokja. • Mekanisme pelaporan, pertanggungjawaban kegiatan, dan publikasi. • Sosialisasi Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-1/SETBPP/JYP/2026 tentang Hak dan Kewajiban Kelompok Kerja. • Mekanisme pembinaan, evaluasi kinerja, dan pemberian sanksi administratif.

	• Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), pengukuhan anggota Pokja, serta penyusunan rencana kerja.
Hasil Kegiatan	• Terbangunnya kesamaan pemahaman mengenai hak, kewajiban, tugas, dan fungsi Anggota Pokja BPP. • Meningkatnya pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan SHEK, tata kelola organisasi, serta administrasi kegiatan. • Disepakatinya mekanisme pelaksanaan tugas, disiplin kerja, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. • Diperolehnya informasi mengenai hak anggota Pokja, termasuk honorarium, perjalanan dinas, jaminan kesehatan, serta rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis. • Menguatnya komitmen anggota Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menindaklanjuti penerbitan SK dan pengukuhan Anggota Pokja Tahun 2026. • Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai penguatan kapasitas anggota Pokja. • Menyusun rencana kerja masing-masing Pokja sesuai tugas dan fungsi. • Melaksanakan koordinasi dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan. • Mengoptimalkan implementasi Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-1/SETBPP/JYP/2026 dalam pelaksanaan tugas Pokja.

	Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Papua.
Dokumentasi	

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Arahan dan Penguatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pokja BPP Papua Barat Daya oleh Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat, 12 Juni 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	- Indeks Pemenuhan Pembelajaran. - Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Bahan Rekomendasi Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan

	Percepatan Pembangunan Otsus (sesuai Bidang Pokja). • Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Dalam rangka memperkuat pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, diperlukan pemahaman yang utuh mengenai tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) BPP, mekanisme kerja, serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya memberikan arahan kepada seluruh Pokja sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Kegiatan ini juga menjadi rapat perdana bagi anggota Pokja hasil Rekrutmen Tahun 2026 untuk memperkuat koordinasi internal, menyamakan persepsi mengenai mekanisme kerja, serta mempersiapkan pelaksanaan berbagai agenda strategis BPP Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memberikan arahan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pokja BPP Papua Barat Daya. • Menyamakan persepsi mengenai implementasi RIPPP, RAPPP, dan kebijakan internal BP3OKP. • Memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar Pokja dalam mendukung pelaksanaan SHEK. • Meningkatkan profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas anggota Pokja. • Menyiapkan bahan rekomendasi strategis dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Koordinator Pokja BPP Papua Barat Daya. • Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya. • Sekretariat BPP Papua Barat Daya. • Seluruh Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi, dan Pengarahan.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai.
Poin-Poin Pembahasan	• Penguatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Pokja BPP. • Implementasi RIPP dan RAPP sebagai pedoman penyusunan program kerja. • Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar Pokja. • Penataan administrasi, mekanisme disposisi surat, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan. • Penguatan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. • Persiapan agenda strategis bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. • Pembahasan isu strategis keamanan di Kabupaten Maybrat dan Tambrau, termasuk konsep klusterisasi wilayah, pemanfaatan pasukan organik, serta penyusunan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Papua Barat Daya. • Pengembangan konsep Kampung Sehat, Kampung Cerdas, Kampung Produktif, dan Kampung Damai sebagai model pembangunan terpadu.

Hasil Kegiatan	• Terbangunnya kesamaan persepsi seluruh Pokja mengenai arah kebijakan dan mekanisme pelaksanaan tugas BPP Papua Barat Daya. • Meningkatnya pemahaman anggota Pokja terhadap RIPPP, RAPPP, serta ketentuan internal BP3OKP sebagai pedoman pelaksanaan tugas. • Menguatnya koordinasi dan kolaborasi antar Pokja dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK. • Disepakatinya penyusunan rekomendasi strategis terkait kondisi keamanan di Kabupaten Maybrat dan Tambrau sebagai bahan pembahasan bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. • Teridentifikasinya pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, Kampung Produktif, dan Kampung Damai sebagai model pembangunan berbasis masyarakat. • Tersusunnya pembagian tugas awal dan penguatan komitmen anggota Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua secara profesional dan akuntabel.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun rencana kerja Pokja yang mengacu pada RIPPP, RAPPP, dan kebijakan BP3OKP. • Memperkuat koordinasi lintas Pokja, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program prioritas. • Menyusun bahan rekomendasi kepada Gubernur Papua Barat Daya terkait situasi keamanan di Kabupaten Maybrat dan Tambrau. • Menyiapkan kajian mengenai klasterisasi wilayah dan pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, Kampung Produktif, dan Kampung Damai sebagai model pembangunan terpadu.

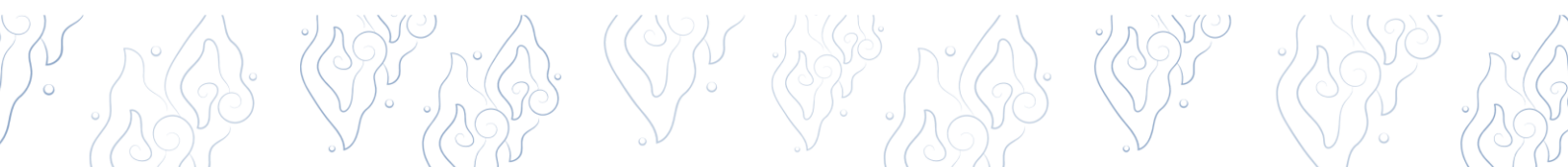
	• Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Pokja secara berkala serta meningkatkan kapasitas anggota melalui pembinaan dan forum pembelajaran. • Memperkuat komunikasi dan koordinasi internal guna mendukung pelaksanaan empat misi pembangunan Papua secara terintegrasi.
Dokumentasi	

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Rapat Internal BPP Papua Barat Daya: Diskusi Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 15 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
Latar Belakang	Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, diperlukan koordinasi internal untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai isu strategis yang memengaruhi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Diskusi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat

	sinergi antar Pokja dalam memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan, khususnya pada sektor kesehatan, sehingga arah pembangunan daerah selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. • Membangun kesamaan persepsi antar Pokja mengenai arah kebijakan pembangunan, khususnya pada Misi Papua Sehat. • Menyusun masukan dan rekomendasi awal sebagai bahan pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Memperkuat koordinasi internal dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Koordinator dan Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya. • Sekretariat BPP Papua Barat Daya. • Seluruh Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi, dan Pengarahan.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai.
Poin-Poin Pembahasan	• Identifikasi isu-isu strategis pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya.

	• Sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. • Pembahasan peran Pokja dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK. • Penguatan koordinasi internal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	• Teridentifikasinya sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya. • Terbangunnya kesamaan persepsi antar Pokja mengenai prioritas pembangunan dan pelaksanaan fungsi SHEK. • Tersusunnya masukan awal sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. • Menguatnya koordinasi internal BPP Papua Barat Daya dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun rekomendasi hasil diskusi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. • Melakukan koordinasi lanjutan dengan perangkat daerah terkait untuk pendalaman isu strategis sektor kesehatan. • Mengintegrasikan hasil pembahasan ke dalam pelaksanaan fungsi SHEK dan agenda kerja BPP Papua Barat Daya. • Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan Papua.





Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Rapat Internal Tindak Lanjut Hasil SHEK bersama Gubernur Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 17 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Dalam rangka menindaklanjuti arahan dan hasil pembahasan bersama Gubernur Papua Barat Daya terkait pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan rapat internal sebagai forum koordinasi untuk menyelaraskan hasil pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Rapat ini bertujuan menyusun langkah tindak lanjut atas berbagai isu strategis pembangunan, memperkuat koordinasi antar-Pokja, serta memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara terarah dan selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), Rencana Aksi Percepatan Pembangunan

	Papua (RAPPP), serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Menindaklanjuti arahan Gubernur Papua Barat Daya hasil pelaksanaan SHEK. • Menyelaraskan langkah kerja antar-Pokja dalam pelaksanaan program prioritas percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. • Menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan masukan kebijakan bagi pimpinan BPP. • Memperkuat koordinasi internal dalam pelaksanaan fungsi SHEK.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Koordinator Kelompok Kerja (Pokja). • Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam/Damai. • Sekretariat BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Seluruh Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Tindak lanjut arahan Gubernur Papua Barat Daya terhadap hasil pelaksanaan SHEK. • Evaluasi isu-isu strategis pembangunan yang memerlukan koordinasi lintas sektor. • Penyelarasan rencana kerja dan pembagian tugas masing-masing Pokja. • Penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut kepada pemerintah daerah.

	• Penguatan koordinasi internal untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua.
Hasil Kegiatan	• Tersusunnya rencana tindak lanjut atas arahan Gubernur Papua Barat Daya. • Terbangunnya kesepahaman antar-Pokja mengenai prioritas pelaksanaan program dan pembagian tugas. • Tersusunnya bahan rekomendasi sebagai masukan bagi pimpinan BPP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. • Menguatnya koordinasi internal dalam pelaksanaan fungsi SHEK dan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menindaklanjuti hasil rapat melalui pelaksanaan program sesuai bidang tugas masing-masing Pokja. • Menyampaikan rekomendasi hasil rapat kepada Pimpinan BPP sebagai bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. • Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil SHEK secara berkala. • Memperkuat koordinasi lintas Pokja dan dengan perangkat daerah untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan efektif.
Dokumentasi	

Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Pengukuhan & Pembekalan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026 Badan Pengarah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Rabu, 22-23 Juni 2026 di Swissbell Hotel, Jayapura
IKU	• Indeks Pemenuhan Pembelajaran. • Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), Sekretariat Badan Pengarah Papua menyelenggarakan kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, mekanisme kerja Pokja, serta penguatan koordinasi lintas bidang agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengukuhkan Anggota Pokja Rekrutmen Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kelembagaan BPP. • Meningkatkan pemahaman anggota mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Pokja. • Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan fungsi SHEK.

	• Memperkuat koordinasi dan sinergi antar-Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel.
Peserta Kegiatan	• Pimpinan Badan Pengarah Papua (BPP). • Sekretariat Badan Pengarah Papua. • Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026 dari seluruh wilayah kerja BPP.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. • Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Anggota Pokja BPP. • Pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Implementasi RIPP dan RAPP sebagai pedoman penyusunan program kerja. • Penguatan koordinasi lintas Pokja dan lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Tata kelola organisasi, mekanisme pelaporan, serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas anggota Pokja.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya pengukuhan Anggota Pokja Rekrutmen Tahun 2026. • Meningkatnya pemahaman peserta mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Pokja BPP.

	• Terbangunnya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan fungsi SHEK di seluruh wilayah kerja BPP. • Menguatnya koordinasi dan sinergi antar-Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Meningkatnya kesiapan anggota Pokja dalam melaksanakan tugas sesuai bidang dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun rencana kerja masing-masing Pokja sesuai tugas dan bidangnya. • Memperkuat koordinasi antara Pokja, Sekretariat BPP, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua. • Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja secara berkelanjutan. • Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi SHEK sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. • Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program BPP.
Dokumentasi	

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Ibadah Syukur Pengukuhan Pokja Rekrutmen 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 25 Juni 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
IKU	• Indeks Pemenuhan Pembelajaran. • Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua. • Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua.
Latar Belakang	Sebagai ungkapan rasa syukur atas telah dilaksanakannya proses rekrutmen dan pengukuhan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Tahun 2026, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Ibadah Syukur bersama seluruh unsur pimpinan, sekretariat, dan anggota Pokja. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai integritas, kebersamaan, dan semangat pengabdian dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Selain sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi Pokja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mensyukuri terlaksananya proses pengukuhan Anggota Pokja Rekrutmen Tahun 2026. • Mempererat kebersamaan dan kekompakan antara pimpinan, sekretariat, dan seluruh anggota Pokja. • Memperkuat komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi BPP.

	• Menumbuhkan nilai integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Membangun semangat kerja yang harmonis dan kolaboratif di lingkungan BPP Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Sekretariat BPP Papua Barat Daya. • Seluruh Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Tahun 2026. • Rohaniawan/Pemimpin Ibadah.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai.
Poin-Poin Pembahasan	• Ungkapan syukur atas pengukuhan Anggota Pokja Rekrutmen Tahun 2026. • Penguatan nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Pokja. • Pentingnya kerja sama, kebersamaan, dan koordinasi antar-Pokja dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK. • Penguatan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan akuntabel. • Harapan dan motivasi bagi seluruh anggota Pokja dalam menjalankan program kerja BPP Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya Ibadah Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas pengukuhan Anggota Pokja Tahun 2026.

	• Meningkatnya semangat kebersamaan, kekompakan, dan komitmen seluruh anggota Pokja dalam melaksanakan tugas. • Menguatnya nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai landasan pelaksanaan tugas Pokja. • Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pimpinan, sekretariat, dan seluruh anggota Pokja. • Terciptanya suasana kerja yang harmonis sebagai modal dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Memperkuat koordinasi dan komunikasi internal antar-Pokja dalam pelaksanaan program kerja. • Menjaga semangat kebersamaan, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. • Melaksanakan tugas dan fungsi Pokja sesuai ketentuan dan arah kebijakan BPP. • Mengoptimalkan kolaborasi lintas bidang untuk mendukung pelaksanaan fungsi SHEK secara efektif. • Menjadikan nilai-nilai yang diperoleh dalam kegiatan sebagai pedoman dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Dokumentasi	

BAB IV

CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Capaian

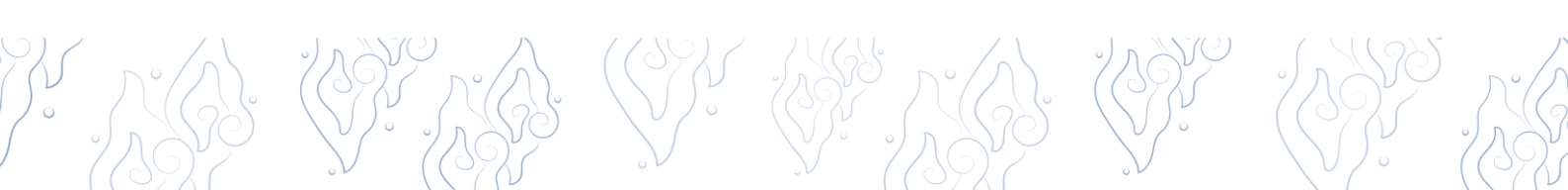
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Juni 2026, diperoleh berbagai capaian strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Pelaksanaan SHEK dan Kolaborasi Lintas Sektor

- a. Meningkatnya pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) melalui berbagai forum koordinasi, konsultasi, monitoring lapangan, assessment, Focus Group Discussion (FGD), dan audiensi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.
- b. Menguatnya sinergi antara BPP Papua Barat Daya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.
- c. Terbangunnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB), RIPPP, dan RAPPP sebagai arah pembangunan Papua.
- d. Tersusunnya berbagai rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua Barat Daya.

2. Penguatan Misi Papua Sehat

- a. Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam mendukung penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), termasuk penyusunan kebijakan nasional mengenai percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua
- b. Menguatnya kolaborasi dengan organisasi profesi kesehatan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.



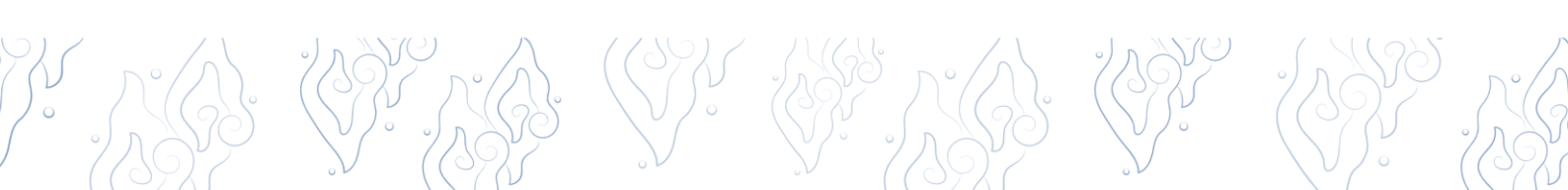
- c. Teridentifikasinya kebutuhan penguatan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta alternatif pembiayaan program kesehatan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
- d. Tersusunnya berbagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai dasar pelaksanaan program kesehatan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

3. Penguatan Misi Papua Cerdas

- a. Menguatnya koordinasi pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi SHEK bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan pendidikan.
- b. Terbangunnya kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Papua (UNIPA) dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Teridentifikasinya praktik baik (best practice), tantangan implementasi, serta rekomendasi penguatan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai salah satu program prioritas Papua Cerdas.
- d. Tersusunnya berbagai rekomendasi kebijakan dalam mendukung penguatan tata kelola pendidikan, pendidikan khusus, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua.

4. Penguatan Misi Papua Produktif

- a. Terlaksananya SHEK pada sektor transportasi, konektivitas wilayah, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- b. Teridentifikasinya kebutuhan penguatan infrastruktur transportasi dan konektivitas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Menguatnya koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi UMKM, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
- d. Tersusunnya berbagai rekomendasi sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

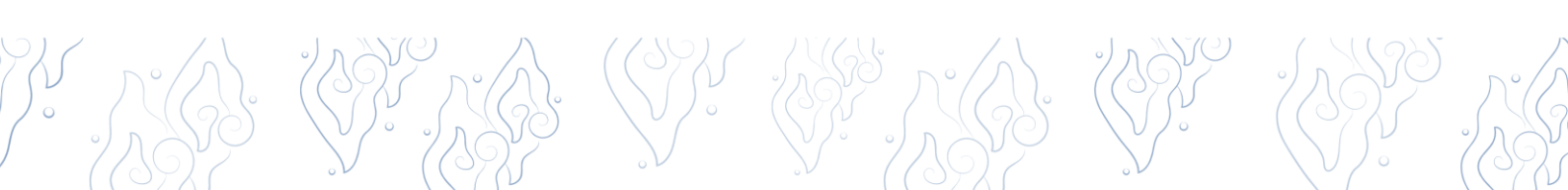


5. Penguatan Misi Papua Damai

- a. Menguatnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas sosial di wilayah Papua Barat Daya.
- b. Teridentifikasinya berbagai isu strategis pascakonflik, termasuk aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik, hak masyarakat adat, dan pendekatan keamanan yang lebih humanis.
- c. Terbangunnya komunikasi lintas sektor sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dalam mendukung Papua Damai.
- d. Menguatnya sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat percepatan pembangunan di Tanah Papua.

6. Penguatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Papua

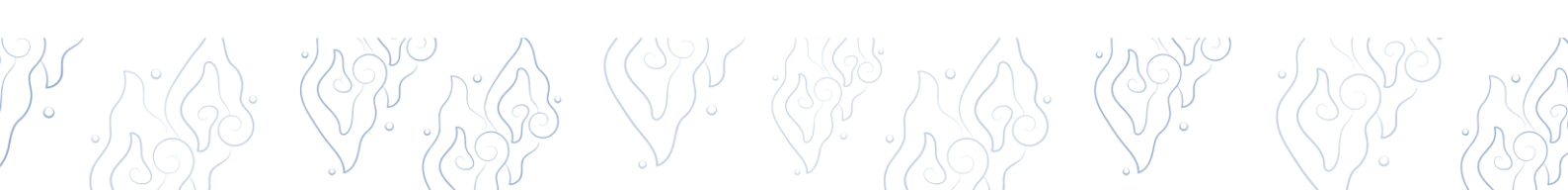
- a. Terlaksananya koordinasi dan assessment awal pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kampung Ayata sebagai model pembangunan berbasis kampung.
- b. Teridentifikasinya kebutuhan prioritas pembangunan melalui assessment lapangan pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan kampung, dan keamanan.
- c. Menguatnya koordinasi dalam pengembangan Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIOPADA) sebagai bagian dari Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) Data OAP Terpilah.
- d. Terlaksananya monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG), koordinasi persiapan Papeda Summit 2026, monitoring kondisi pascakebakaran di Klademak II Kota Sorong, serta berbagai kegiatan strategis lainnya sebagai bentuk penguatan fungsi SHEK dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.



4.2 Permasalahan

Meskipun berbagai capaian telah diperoleh selama pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pada bulan Juni 2026, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut bersama, yaitu:

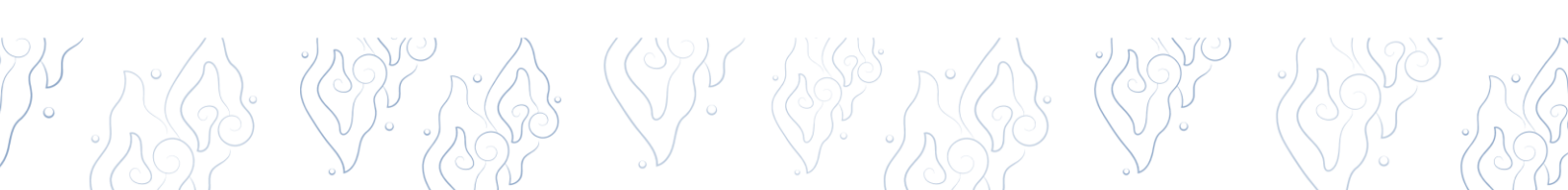
1. Sinkronisasi program dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya optimal, baik dalam penyelarasan program lintas sektor maupun tindak lanjut rekomendasi hasil SHEK ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Keberlanjutan pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), masih menghadapi tantangan pembiayaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan program pendidikan, termasuk Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), masih menghadapi kendala berupa keterbatasan data pendukung, sumber daya manusia, aksesibilitas wilayah, pembiayaan, serta belum optimalnya regulasi pendukung.
4. Konektivitas wilayah dan pengembangan ekonomi masyarakat masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur transportasi, akses distribusi, serta belum optimalnya pemberdayaan UMKM dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
5. Pengelolaan data Orang Asli Papua (OAP) masih memerlukan penguatan melalui penyediaan data yang valid, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Pengembangan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB), termasuk pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, Kampung Produktif, dan Kampung KB Produktif, masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
7. Stabilitas sosial pada beberapa wilayah masih memerlukan perhatian melalui penguatan pendekatan dialogis, penyelesaian berbagai aspirasi masyarakat, percepatan penanganan pascakejadian, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.



4.3 Tantangan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya, terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan, yaitu:

1. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Memastikan implementasi RIPPP, RAPPP, dan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) dapat berjalan secara terintegrasi pada seluruh sektor pembangunan.
3. Memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi Orang Asli Papua di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
4. Mendorong percepatan pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, Kampung Produktif, serta Kampung KB Produktif sebagai model pembangunan berbasis kampung.
5. Mewujudkan sistem data Orang Asli Papua yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
6. Memperkuat konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.
7. Mengembangkan pendekatan pembangunan yang mengedepankan dialog, harmoni sosial, perlindungan masyarakat adat, serta keamanan yang humanis.
8. Memperluas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Juni 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) telah berjalan dengan baik melalui berbagai kegiatan strategis pada Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai, serta pelaksanaan Program Strategis Bersama.

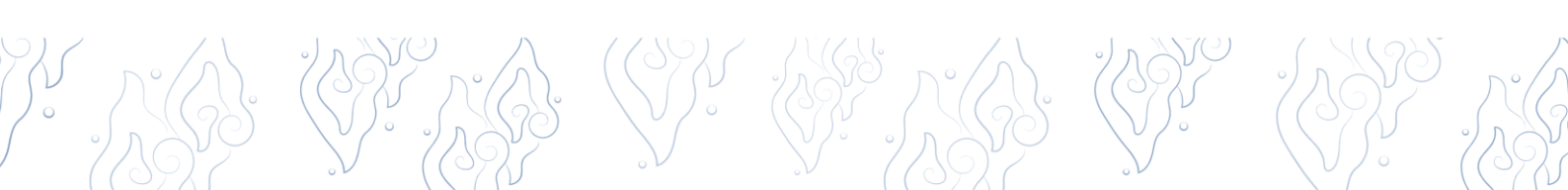
Pelaksanaan SHEK berhasil memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat adat, dan mitra pembangunan dalam mendukung implementasi RIPPP dan RAPPP di Provinsi Papua Barat Daya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan rekomendasi strategis pada bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan berbasis kampung, tata kelola data Orang Asli Papua, pengembangan ekonomi masyarakat, serta penguatan stabilitas sosial sebagai dasar penyempurnaan kebijakan percepatan pembangunan Papua Barat Daya.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi program, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan data pembangunan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor agar tujuan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua dapat tercapai secara optimal.

5.2 Rekomendasi

1. Memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPPP, dan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB).
2. Mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil SHEK pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan berbasis kampung.



3. Memperkuat implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), SIOPADA, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembangan Kampung Sehat, Kampung Cerdas, Kampung Produktif, dan Kampung KB Produktif.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pelayanan dasar, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perlindungan masyarakat adat.
5. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil SHEK agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan.

5.3 Penutup

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Periode Juni 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

Berbagai capaian yang diperoleh selama bulan Juni 2026 menunjukkan semakin menguatnya peran BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya sebagai penghubung (bridging institution) dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Ke depan, penguatan kolaborasi, tindak lanjut rekomendasi hasil SHEK, serta konsistensi implementasi RIPP dan RAPP diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, produktif, damai, dan berkelanjutan.

